

**Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan dan Tata Kelola Perusahaan  
Terhadap Tingkat Kepatuhan Syariah Bank Syariah Di Indonesia**



**Diajukan Oleh:  
Muhammad Adib Hasani  
19919013**

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA  
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2021**

**Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan dan Tata Kelola Perusahaan  
Terhadap Tingkat Kepatuhan Syariah Bank Syariah Di Indonesia**

TESIS S-2

Program Magister Akuntansi



**Diajukan Oleh:**

**Muhammad Adib Hasani**

**19919013**

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2021**

**HALAMAN PENGESAHAN**



Yogyakarta, \_\_\_\_\_

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rifqi Muhammad', is written over the printed name below.

Rifqi Muhammad, SE., SH., M.Sc., SAS., Ph.D.

## BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 Program Studi Akuntansi Program Magister, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

**MUHAMMAD ADIB HASANI**

No. Mhs. : 19919013

Konsentrasi : Akuntansi Syariah

Dengan Judul:

**ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN  
TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN SYARIAH BANK SYARIAH**

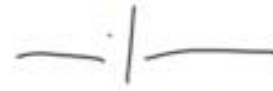
Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,  
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Rifqi Muhammad, SE., SH., M.Sc., SAS., Ph.D.

Penguji II



Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA.

Mengetahui

Program Studi,



Drs. Desak Gurnisih, SSi., M.Com., Ph.D., CfrA.

## Halaman Persembahan

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tak henti-hentinya terus diberikan kepada kita. Shalwat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita jadikan panutan dalam mengarungi kehidupan dunia, sehingga nantinya, kita mendapat keselamatan dunia dan akhirat.

*Alhamdulillahirobbil alamin* pada kesempatan ini telah selesai tugas tesis yang dikerjakan dengan penuh kesabaran dan cobaan. Akan tetapi berkat dukungan orang-orang yang sangat penulis hormati dan cintai, tesis ini telah rampung dikerjakan, sehingga tesis ini penulis persembahkan kepada:

- Kedua orang tuaku, Bapak Masngudi dan Ibu Munawaroh yang tak henti-hentinya memberikan doa, semangat, kasih sayang dan dukungan kepada penulis.
- Muhammad Rasyid Ridlo, adik dan juga sahabat yang selalu saling memberikan dukungan dan saling menguatkan dalam menghadapi cobaan dan ujian.
- Citra Choirunnisa, Istri dan juga sahabat yang selalu memberikan waktu, semangat dan kekuatannya dalam menghadapi kehidupan bersama.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirabbal-‘alamin*, Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “***Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Tingkat Kepatuhan Syariah Bank Syariah Di Indonesia***”. Sholawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya.

Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai derajat Magister Akuntansi (M.Ak) di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penyusun ingin menyampaikan terima kasih yang dalam kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini, pihak-pihak tersebut adalah:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S. T., M.Sc selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Arief Rahman, S.E., M.Com., Ph.D selaku Ketua Prodi Magister Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indoensia.
3. Bapak Rifqi Muhammad, SE., SH., M.Sc., SAS., Ph.D selaku Dosen Pembimbing Tesis yang senantiasa sabar mengarahkan dan membimbing penulis dari awal hingga akhir penulisan tesis ini.
4. Bapak Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA selaku dosen penguji tesis yang telah memberikan masukan dalam penyusunan tesis.
5. Seluruh Dosen Faultas Bisnis dan Ekonomika UII yang telah memberikan ilmu serta pengalaman pengetahuannya kepada penulis selama perkuliahan
6. Seluruh pegawai dan staf Tata Usaha Faultas Bisnis dan Ekonomika UII.
7. Kedua Orang tuaku yaitu Ayahanda Masngudi dan Ibunda Munawaroh yang terus mendidik dengan penuh kesabaran dan selalu memberikan arahan untuk menjadi orang yang bermanfaat didalam kehidupan bermasyarakat. Serta kepada saudara

tunggalku Muhammad Rasyid Ridlo yang tak cuma sebagai seorang saudara kecil saja tapi juga sebagai sahabat.

8. Citra Choirunnisa yang terus memberikan dukungan, semangat, waktu dan kesabaran dalam menjalani kehidupan bersama.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan mereka dengan karunia-Nya. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun dengan kerendahan hati penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembacanya. *Aamiin Yaa Rabbal Alaamiin.*

Yogyakarta, 10 Oktober 2022

Penyusun

**Muhammad Adib Hasani**  
**No. Mahasiswa 19919013**

الجامعة الإسلامية  
الاستدراك

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>I</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>II</b>
<b>HALAMAN BERITA ACARA UJIAN TESIS.....</b>	<b>III</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>IV</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>V</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>VII</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>X</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>XI</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>XII</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>XIII</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Teori Agensi .....	10
2.2 Teori Signaling .....	11
2.3 Akuntabilitas dalam Perspektif Islam.....	11
2.4 Karakteristik DPS.....	13
2.5 Karakteristik Tata Kelola Perusahaan .....	15
2.6 Karakteristik Perusahaan .....	18
2.7 Penelitian Terdahulu.....	19
2.8 Kerangka Pemikiran .....	24
2.9 Pengembangan Hipotesis.....	31
2.9.1 Remunerasi DPS.....	31
2.9.2 <i>Cross-membership</i> DPS .....	32
2.9.3 Komisaris Independen.....	33
2.9.4 Komite Audit Independen .....	33



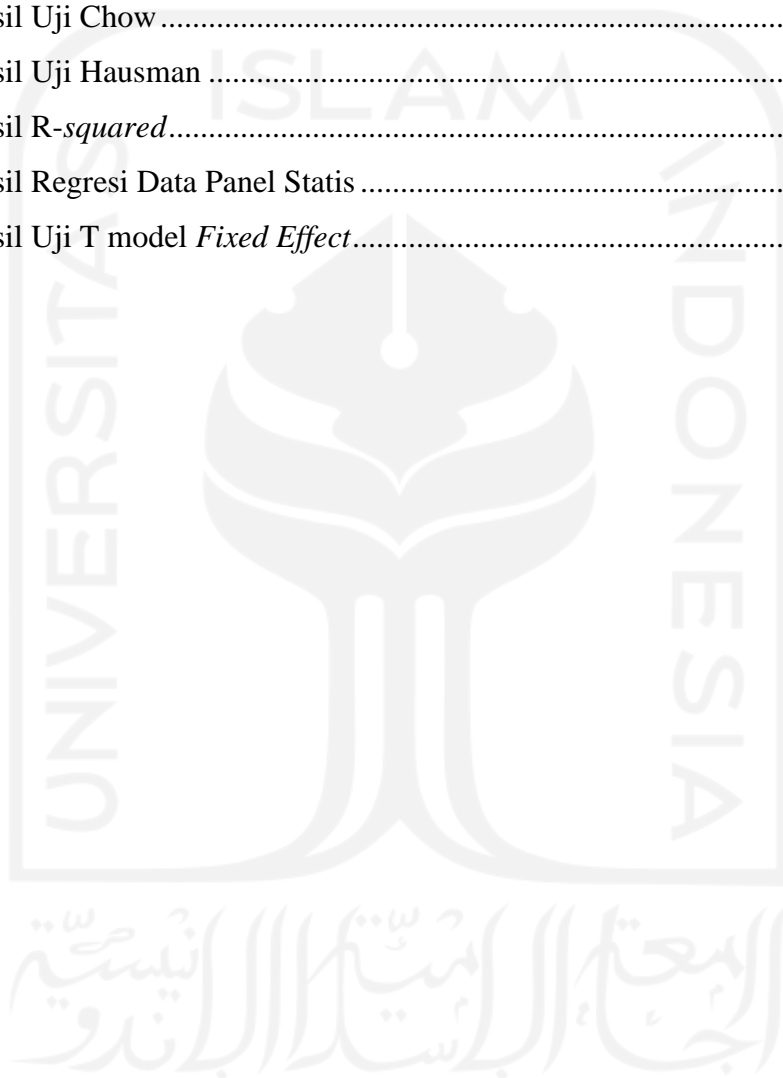
2.9.5	<i>Investment Account Holders</i> .....	34
2.9.6	<i>Leverage</i> .....	35
2.9.7	Profitabilitas .....	36
2.9.8	Ukuran Perusahaan.....	37
<b>BAB III:</b>	<b>METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>38</b>
3.1	Jenis dan Sumber Data .....	38
3.2	Populasi dan Sampel Data .....	38
3.3	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel .....	38
3.3.1	Variabel Dependen .....	38
3.3.2	Variabel Independen.....	39
3.4	Metode Analisis Data .....	43
3.5	Estimasi Model Regresi dengan Model Panel.....	43
3.6	Pemilihan Model Regresi .....	46
3.7	Uji Asumsi Klasik .....	47
3.8	Pengujian Hipotesis .....	48
<b>BAB IV:</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>49</b>
4.1	Statistik Deskriptif .....	49
4.2	Hasil Uji Asumsi Klasik .....	55
4.2.1	Analisis Uji Normalitas.....	55
4.2.2	Analisis Uji Multikolinearitas.....	56
4.3	Pemilihan Model Regresi.....	57
4.3.1	. Uji Chow .....	57
4.3.2	. Uji Hausman.....	57
4.4	Pengujian Hipotesis.....	58
4.4.1	Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	58
4.4.2	Uji Signifikansi Simultan .....	59
4.4.3	Model Regresi .....	59
4.4.4	Uji Signifikansi Parameter Individu .....	63
<b>BAB V:</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	<b>73</b>
5.1	Kesimpulan.....	73

5.2 Keterbatasan dan Saran .....	73
5.3 Implikasi Penelitian .....	76
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>79</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar Bank Syariah Sampel .....	49
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif.....	50
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas.....	56
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas .....	56
Tabel 4.5 Hasil Uji Chow .....	57
Tabel 4.6 Hasil Uji Hausman .....	58
Tabel 4.7 Hasil R-squared.....	58
Tabel 4.8 Hasil Regresi Data Panel Statis .....	60
Tabel 4.9 Hasil Uji T model <i>Fixed Effect</i> .....	63



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran ..... 30



## DAFYAR LAMPIRAN

Lampiran 1, Rangkuman Data.....	87
Lampiran 2. Item Pengungkapan Kepatuhan .....	90
Lampiran 3. Hasil CEM .....	92
Lampiran 4. Hasil FEM.....	93
Lampiran 5. Hasil Uji Chow.....	94
Lampiran 6. Hasil REM .....	95
Lampiran 7. Hasil Uji Hausman.....	96



## Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan syariah bank syariah di Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini menguji 60 observasi yang berisikan 10 bank syariah dengan rentang waktu enam tahun yaitu 2015-2020. Dalam perumusan faktor-faktor ini, peneliti mencoba menganalisis tiga topik utama yang ada dalam bank syariah. Pertama, topik yang berhubungan dengan dewan pengawas syariah yaitu remunerasi DPS dan keanggotaan silang DPS. Kedua, topik yang berhubungan dengan tata kelola perusahaan yaitu komisaris independen dan komite audit independen. Ketiga, topik yang berhubungan dengan kinerja keuangan bank yaitu *investment account holders* (IAH), *leverage*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Adapun untuk variabel dependen dalam penelitian berupa tingkat kepatuhan syariah yang diukur dengan jumlah item yang diungkapkan bank syariah dibagi dengan jumlah standar item diungkapkan. Adapun dalam melakukan analisis ini, peneliti menggunakan analisis regresi data panel. Adapun variabel-variabel yang mempengaruhi tingkat pengungkapan kepatuhan syariah di antaranya keanggotaan-silang DPS, komisaris independen, dan komite audit independen. Sedangkan variabel remunerasi DPS, IAH, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan syariah. Hasil ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ke dalam pengembangan studi akuntansi syariah dan kebijakan pengembangan tata kelola bank syariah yang lebih efektif.

**Kata Kunci:** bank syariah, kepatuhan syariah, DPS, tata kelola.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perbankan syariah merupakan salah satu institusi keuangan yang mengalami pertumbuhan paling pesat dalam beberapa dekade terakhir ini. Salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan bank syariah adalah meningkatnya populasi Muslim di seluruh dunia. Bahkan pada tahun 2030, populasi Muslim diprediksikan mencapai 25% dari populasi dunia (Anwar *et al.*, 2020). Dengan meningkatnya populasi Muslim ini, menjadikan bank syariah memiliki *captive market*. *Captive market* memiliki arti bahwa mayoritas muslim memiliki sentimen psikologi untuk lebih mengutamakan penggunaan layanan bank syariah karena adanya jaminan keamanan berupa *halal* (Prabowo dan Jamal, 2017).

*Halal* merupakan sesuatu yang sangat fundamental bagi Muslim. Konsep *halal* bahkan menjadi akar utama dalam pendirian bank syariah. Hal ini dikarenakan, bagi Muslim tunduk kepada syariat Islam (hukum Islam) lebih penting daripada semua keuntungan lainnya, termasuk keuntungan finansial (Saqib *et al.*, 2016). Farook (2008) dalam Sarea dan Hanefah (2013) menjelaskan, bahwa umat Islam dilarang untuk menginvestasikan dananya pada perusahaan yang melakukan kegiatan yang diharamkan seperti peternakan babi, penghasil alkohol dan aktivitas yang berkaitan dengan bunga. Sehingga sudah sewajarnya bagi Muslim untuk memilih dan menggunakan layanan yang ditawarkan bank syariah.

Bank syariah adalah bank yang aktivitasnya sesuai dengan hukum syariah yang bersumber dari interpretasi Al-Quran dan Sunnah serta sumber sekunder hukum Islam

lainnya seperti Ijma', Qiyas, dan Ijtihad (Sellami dan Tahari, 2017). Bagi bank syariah, kepatuhan terhadap syariah merupakan sesuatu yang sangat penting. Ullah (2014) menyampaikan bahwa bank syariah yang tidak mengikuti hukum atau pedoman syariah maka bank tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai bank syariah.

Rashid *et al.* (2014) menyampaikan bahwa kepatuhan syariah menjadi faktor terpenting dalam memilih bank syariah. Selain itu, kepatuhan syariah dapat menjamin kredibilitas bank syariah. Kepatuhan syariah ini juga menjadi ciri utama bank syariah, yang selanjutnya menjadi landasan utama nasabah untuk memilih menggunakan layanan bank syariah (Aziah, 2012). Dawood (2008) dalam Ahmed *et al.* (2014) menambahkan, kepatuhan syariah dalam bisnis juga berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan spiritual.

Isu mengenai kepatuhan syariah bagi bank syariah merupakan sesuatu yang sangat sensitif. Hal ini berkaitan dengan membuktikan apakah aktivitas bank syariah sudah memenuhi hukum atau pedoman syariah. Dalam beberapa penelitian terdahulu, terdapat beberapa peneliti yang menyampaikan bahwa masih banyak bank syariah yang memiliki skor kepatuhan syariah yang rendah. Malik *et al.* (2011) berpendapat bahwa sebagian besar pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah lebih mirip dengan instrumen utang daripada bagi hasil. Yusof dan Fahmy (2008) juga menemukan anggapan negatif terhadap bank syariah bahwa "*no difference at all*" atau tidak ada perbedaan sama sekali antara bank syariah dengan konvensional. Mereka hanya menggantikan nama dari *interest rate* menjadi *profit rate*.

Meera dan Larbani (2009) dalam Karim dan Shetu (2020) menyampaikan bahwa beberapa model bank syariah masih memiliki kemiripan dengan bank konvensional,



sehingga akan berdampak pada tidak tercapainya tujuan hukum Islam. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan syariah adalah kurangnya pengetahuan pengawas syariah, serta kurangnya perhatian terhadap audit syariah (Ullah, 2014). Ahmad dan Hassan (2007) menambahkan bahwa kurangnya kerangka regulasi dan pengawasan yang terdefinisi dengan baik untuk bank syariah berdampak pada kurangnya kepatuhan syariah.

Berdasarkan paparan di atas, peneliti akan menguji tingkat kepatuhan bank syariah di Indonesia. Adapun indikator kepatuhan syariah dalam penelitian ini didasarkan pada indikator yang telah diusulkan oleh El-Halaby dan Hussainey (2016). Alasan daripada memilih indikator yang diajukan oleh El-Halaby dan Hussainey (2016) dikarenakan indikator tersebut mencakup tiga karakteristik pengungkapan kepatuhan bank syariah, di antaranya pengungkapan syariah, sosial dan keuangan. Alasan selanjutnya, karena indikator yang diajukan oleh El-Halaby dan Hussainey (2016) sudah merepresentasikan pengungkapan wajib yang tercantum dalam AAOIFI *Governance Standard No. 1*, *Accounting Standard No. 1*, dan *Governance Standard No.7*. Lebih lanjut penelitian ini juga akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan kepatuhan syariah.

Penelitian yang dilakukan Ullah (2014) menemukan bahwa rendahnya kepatuhan syariah di Bangladesh disebabkan oleh kurangnya pengawas syariah yang mampu menjalankan pengawasan syariah dengan maksimal. Padahal pengawas syariah memiliki peran yang sangat signifikan dalam praktik perbankan syariah kontemporer (Karim dan Shetu, 2020). Oleh karenanya, untuk terlaksananya kepatuhan syariah dibutuhkanlah

dewan pengawas syariah (DPS) yang memiliki pemahaman yang mendalam, bukan hanya dari segi syariah tetapi juga dari sisi akuntansi, keuangan dan industri perbankan.

Selanjutnya, untuk meningkatkan dan memotivasi DPS untuk bekerja dengan lebih baik, maka remunerasi dapat dijadikan sebagai medianya (Mnif dan Tahari, 2020b). Penelitian yang dilakukan oleh El-Halaby dan Hussainey (2016) juga menemukan bahwa *cross-membership* dapat meningkatkan keahlian dan pengalaman DPS. *Cross-membership* ini juga akan meningkatkan tingkat pengungkapan kepatuhan syariah pada bank lain.

Tingkat pengungkapan kepatuhan syariah juga dipengaruhi oleh terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik. Beberapa faktor kuncinya adalah keberadaan dewan komisaris independen, anggota komite audit independen dan konsentrasi kepemilikan. Chau dan Leung (2006) menyampaikan bahwa keberadaan dewan komisaris independen akan meningkatkan pengawasan atas manajemen, karena mereka tidak terafiliasi dengan perusahaan sebagai pejabat atau karyawan, melainkan perwakilan independen dari kepentingan pemegang saham. Sehingga kehadiran dewan komisaris independen ini akan meningkatkan kualitas pelaporan.

Keberadaan komite audit independen juga akan meningkatkan kualitas pelaporan, hal ini dikarenakan komite audit independen dapat mengurangi oportunistik manajer di dalam menentukan pilihan akuntansi keuangannya (Mnif dan Tahari, 2020a). Faktor selanjutnya adalah struktur kepemilikan. Kepemilikan saham yang tersebar kepada banyak investor dapat berfungsi sebagai mekanisme pemantauan yang efisien. Hal ini dikarenakan kepemilikan perusahaan yang menyebar, membuat manajer harus mengungkapkan lebih banyak informasi (Juhmani, 2017). Di dalam bank syariah, terdapat

struktur kepemilikan yang tidak dimiliki oleh bank konvensional berupa *investment account holders* atau berupa dana syirkah temporer.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan syariah selanjutnya berasal dari kinerja keuangan perusahaan seperti profitabilitas, ukuran perusahaan dan *leverage*. Menurut teori *signaling*, perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi cenderung akan menyajikan informasi lebih rinci dengan tujuan menarik minat calon investor dan menghindarkan perusahaan dari *undervaluation* (Alrawahi dan Sarea, 2016). Faktor selanjutnya adalah ukuran perusahaan. Menurut teori biaya politik, ukuran perusahaan yang semakin besar menyebabkan perusahaan lebih diperhatikan oleh berbagai pihak seperti pemerintah. Sehingga untuk mengurangi biaya politik yang besar, perusahaan dapat menggunakan pengungkapan informasi yang mencukupi (Sellami dan Tahari, 2017). Faktor selanjutnya adalah *leverage*. Debreceny and Rahman (2005) menemukan bahwa tingginya rasio *leverage* akan meningkatkan biaya agensi. Oleh karenanya, manajer akan melaporkan informasi lebih banyak untuk membantu kreditor dalam memantau dan mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, peneliti akan melakukan penelitian lanjutan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan kepatuhan syariah bank syariah. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti menguji tata kelola bank syariah dengan lebih komprehensif dan disesuaikan dengan kondisi bank syariah di Indonesia. Di mana bank syariah di Indonesia sebagian besar dimiliki oleh perusahaan induk, sehingga untuk menguji pengaruh struktur kepemilikan terhadap tingkat pengungkapan kepatuhan syariah, peneliti mengujinya dengan *investment account holders* (IAH). Dimana IAH ini dalam beberapa literatur

disebutkan juga sebagai pemilik bank syariah, meskipun tidak memiliki hak suara. Adapun topik tentang dewan pengawas syariah dalam penelitian sebelumnya memasukkan variabel keahlian DPS dalam bidang akuntansi dan keuangan, tetapi variabel ini belum bisa diujikan pada bank syariah saat ini, karena sebagian besar DPS yang duduk pada bank syariah merupakan ahli dalam bidang fiqih muamalah atau syariah. sehingga untuk menguji keahlian anggota DPS, peneliti mengujinya dengan tingkat remunerasi DPS. Perbedaan selanjutnya adalah terletak pada keanggotaan-silang DPS, dimana variabel ini, dalam banyak literatur sebelumnya diukur secara dummy, kekurangan dari pengukuran ini adalah tidak dapat menggambarkan apakah tingkat keanggotaan-silang DPS yang tinggi akan memberikan dampak positif atau negatif terhadap tingkat kepatuhan. Hal ini dikarenakan, ada asumsi yang menyatakan bahwa semakin besar jumlah DPS yang duduk pada beberapa bank syariah akan membuat DPS tidak memiliki cukup waktu untuk memberikan pelayanan syariah kepada bank syariah, dan berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan syariah. Oleh karena itu, pengukuran secara dummy tidak dapat menggambarkan kondisi nyata bank syariah.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Apakah remunerasi DPS berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan syariah?
- b. Apakah *cross-membership* DPS berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan syariah?
- c. Apakah keberadaan komisaris independen berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan syariah?
- d. Apakah keberadaan komite audit independen berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan syariah?
- e. Apakah *investment account holder* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan syariah?
- f. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan syariah?
- g. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan syariah?
- h. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan syariah?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab isu yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan syariah bank syariah di Indonesia, terutama:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh remunerasi DPS terhadap tingkat kepatuhan syariah.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *cross-membership* DPS terhadap tingkat kepatuhan syariah.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh keberadaan komisaris independen terhadap tingkat kepatuhan syariah.

- d. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh komite audit independen terhadap tingkat kepatuhan syariah.
- e. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *investment account holder* terhadap tingkat kepatuhan syariah.
- f. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap tingkat kepatuhan syariah.
- g. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap tingkat kepatuhan syariah.
- h. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap tingkat kepatuhan syariah.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

a. Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan akuntansi syariah di Indonesia. Terutama pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan syariah.

b. Bagi Bank Syariah

Diharapkan penelitian ini dapat memberi gambaran kepada Bank Syariah di Indonesia mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan syariah, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan syariah dan tercapainya prinsip-prinsip syariah di dalam operasional Bank Syariah.

c. Bagi Penyusun Standar Akuntansi

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun dan menetapkan standar akuntansi syariah guna meningkatkan tingkat kepatuhan syariah bagi bank syariah di Indonesia.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Teori Agensi**

Teori agensi merupakan teori yang mendefinisikan perusahaan sebagai perhubungan kontrak yang berfungsi sebagai wadah untuk sebuah proses kompleks di mana tujuan individu yang saling bertentangan dibawa ke dalam keseimbangan kerangka hubungan kontrak. Atau secara sederhana, perusahaan adalah kumpulan kontrak antara pihak-pihak yang berbeda kepentingan yaitu antara pihak agen dengan prinsipal. Fokus daripada teori ini adalah hubungan keagenan yang timbul dari pemisahan kepemilikan dan pengelolaan perusahaan, di mana para prinsipal melibatkan orang lain (sebagai agen) untuk melakukan layanan atas nama prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976).

Asumsi dasar teori ini adalah pihak prinsipal dan agen merupakan aktor rasional yang cenderung berusaha memaksimalkan utilitas masing-masing dalam setiap situasi. Selain itu, teori agensi berasumsi bahwa antara prinsipal dan agen cenderung untuk berperilaku oportunistik atau dalam pengertian masing-masing akan memaksimalkan kepentingan diri sendiri dengan mengorbankan pihak lain (Zainuldin *et al.*, 2018). Meskipun demikian, di dalam konflik kepentingan ini, pihak agen lebih diuntungkan, hal ini karena agen adalah pihak yang memiliki lebih banyak informasi tentang sumber daya yang mereka kelola dari prinsipal atau disebut asimetri informasi. Sehingga bisa saja agen membiarkan informasi kepada prinsipal untuk memaksimalkan kepentingan agen. Oleh karena itu, prinsipal dapat memaksakan struktur kontrol pada agen untuk mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dan asimetri informasi oleh agen (Eisenhardt, 1989).



Dampak dari penerapan struktur kontrol ini akan menimbulkan biaya yang disebut dengan biaya keagenan (Jensen dan Meckling, 1976).

## **2.2 Teori *Signaling***

Teori pensinyalan merupakan teori yang berasumsi bahwa perusahaan yang memiliki kabar baik (*good news*) akan mengungkapkan informasi yang lebih komprehensif kepada pasar, daripada saat memiliki kabar buruk (*bad news*), di mana mereka menyimpannya untuk menghindari *undervaluation*. Teori pensinyalan mengasumsikan bahwa manajer ingin memberi sinyal kepada pemangku kepentingan, bahwa manajer dapat memaksimalkan kekayaan pemangku kepentingan serta memberi sinyal bahwa perusahaan dijalankan secara efisien (Tsalavoutas, 2011). Omar dan Simon (2011) menambahkan bahwa bagi manajer, mengirimkan sinyal ke pasar dapat mengurangi asimetri informasi. Hal ini dapat diartikan sebagai sinyal yang baik bagi pasar. Sinyal yang dikirimkan ke pasar tidak hanya berkaitan dengan keuangan, tetapi juga meliputi pengungkapan kepatuhan perusahaan dengan nilai-nilai komunitas dan persyaratan badan profesional terkait, hal ini juga menjadi informasi yang baik bagi pasar.

## **2.3 Akuntabilitas Dalam Perspektif Islam**

Dalam pembahasan konsep akuntabilitas, salah satu tujuan utama akuntansi adalah penyediaan arus informasi yang adil bagi akuntan dan penerima (Anuar *et al.*, 2009). Berdasarkan konsep akuntabilitas, akuntansi memainkan peran penting sebagai mekanisme yang menyediakan informasi kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat. Selain itu, akuntansi juga dapat dijadikan sarana untuk memenuhi kewajiban agama. Hal ini seperti yang disampaikan Gaffikin (1997) dalam El-Halaby *et al.* (2018)

bahwa “orientasi akuntansi dalam pemenuhan akuntabilitas manusia kepada Tuhan, menyiratkan gambaran, bahwa informasi akuntansi memungkinkan individu untuk mempertanggungjawabkan zakat mereka”. Oleh karena itu, perusahaan menerbitkan laporan keuangan mereka sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan operasional perusahaan yang telah terlaksana.

Akuntabilitas dalam sudut pandang Islam adalah mempertanggungjawabkan tindakan setiap muslim pada hari kiamat. Oleh karena itu, akuntabilitas dalam Islam mengharuskan setiap muslim untuk memastikan bahwa perilaku mereka sesuai dengan ajaran pedoman Islam (Rahman dan Bukair, 2013). Yaya (2004) menambahkan bahwa bagi seorang muslim, apa yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan syariah haruslah menjadi pertimbangan utama dalam mengatur dan melaksanakan bisnis.

Menurut ajaran Islam, aturan utama dalam bisnis adalah kejujuran dan berbuat adil kepada pelanggan, dan untuk memenuhi beban ini, seorang muslim haruslah patuh pada pedoman Islam (El-Halaby *et al.*, 2018). Baydoun dan Willet (1997) dalam Maali *et al.* (2006), menyampaikan bahwa sebagai sarana akuntabilitas, perusahaan perlu mengungkapkan informasi bahwa perusahaan telah melaksanakan kepatuhan mereka terhadap syariah. Maali *et al.* (2006) menambahkan, bahwa persyaratan umat Islam untuk mengungkapkan kebenaran dimaksudkan untuk membantu masyarakat mengetahui pengaruh seseorang atau bisnis terhadap kesejahteraannya. Haniffa dan Hudaib (2007) juga menambahkan pengungkapan informasi ini haruslah dapat diandalkan untuk menunjang pengguna eksternal dalam membuat keputusan agama dan ekonomi.

## **2.4 Karakteristik Dewan Pengawas Syariah**

Bank syariah merupakan salah satu industri keuangan yang terus berkembang di berbagai negara, termasuk Indonesia. Salah satu faktor pendorong berkembangnya bank syariah di Indonesia adalah peran pemerintah yang mengeluarkan undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (7). Melalui undang-undang tersebut pemerintah tidak hanya melegalisasi bank syariah, tetapi juga mengarahkan bank syariah untuk benar-benar menjaga kaidah dan prinsip syariah. Oleh karenanya, perbankan syariah wajib memiliki fungsi pengawasan terhadap kepatuhan syariah (Damayanti *et al.*, 2016).

Salah satu faktor yang menjamin kepatuhan syariah adalah penerapan *good corporate governance* (GCG) di dalam bank syariah. Adapun perbedaan implementasi GCG bank syariah dengan bank konvensional adalah keberadaan Dewan Pengawas Syariah (Alfian *et al.*, 2020). Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan suatu fungsi di dalam organisasi bank syariah yang secara internal merupakan badan pengawas syariah, dan secara eksternal dapat menjaga serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan adanya DPS yang mengontrol dan mengawasi aktivitas bank syariah, diharapkan bank syariah dapat menerima legitimasi dari masyarakat (Mokoginta *et al.*, 2018).

Penelitian sebelumnya telah menemukan bahwa keberadaan DPS dan karakteristiknya dapat meningkatkan kepatuhan bank syariah, seperti remunerasi DPS; keahlian anggota DPS dalam bidang akuntansi dan keuangan; *cross-membership* DPS.

### **2.4.1. Remunerasi DPS**

Menurut Handoko (2014), kompensasi merupakan segala sesuatu yang diterima pegawai sebagai bentuk balas jasa atas kinerja yang telah diberikan kepada perusahaan. Menurut Hasibuan (2014), remunerasi adalah segala jenis pendapatan baik berbentuk

uang ataupun barang yang diterima pegawai sebagai imbalan atas jasa yang diberikan. Menurut Surya (2004), remunerasi meliputi seluruh imbalan yang diberikan organisasi kepada pegawai dalam bentuk uang maupun barang, rutin ataupun tidak rutin, langsung ataupun tidak langsung.

Menurut Juairiah dan Malwa (2016) pemberian remunerasi memiliki hubungan dengan tingkat kinerja, apabila remunerasi yang diberikan kepada pegawai tidak proporsional akan menyebabkan kinerja mereka tidak optimal. Meilinda *et al.* (2019) menambahkan bahwa keterlambatan dalam pemberian remunerasi dapat menurunkan motivasi pegawai untuk menyelesaikan pekerjaannya. Sehingga untuk menghindari hal tersebut dibutuhkanlah sistem remunerasi yang baik (Nurhayati dan Supardi, 2020).

#### **2.4.2. Keahlian Anggota DPS**

Menurut Ghafran dan O'Sullivan (2017), keahlian komite audit berperan penting dalam menjaga proses pelaporan keuangan. Secara khusus, komite audit yang memiliki pengetahuan mendalam pada bidang akuntansi dan keuangan, dipandang lebih baik untuk mengevaluasi laporan area kerja komite yang membutuhkan evaluasi teknis dan pengambilan keputusan. Serupa dengan keahlian komite audit, DPS juga merupakan badan independen yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan dan evaluasi pada aktivitas bank syariah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas kinerja DPS, anggota DPS diharapkan memiliki pengetahuan di bidang akuntansi dan keuangan.

DPS memainkan peran penting seperti komite audit dan auditor eksternal. Hal ini karena, DPS bertugas untuk meninjau semua kontrak, perjanjian, produk, aktivitas keuangan dengan memastikan bahwa bank telah mematuhi aturan dan prinsip syariah. Untuk alasan ini, anggota DPS yang memiliki keahlian akuntansi dan keuangan akan

bekerja lebih efektif daripada DPS yang tidak memiliki keahlian tersebut (Rahman dan Bukair, 2013). Keberadaan anggota DPS dengan keahlian akuntansi dan keuangan dapat mempengaruhi luasnya pengungkapan karena kesadaran mereka akan pentingnya pelaporan yang transparan. Anggota DPS dengan keahlian akuntansi dan keuangan cenderung lebih memahami pentingnya pengungkapan kepada pemangku kepentingan. Akibatnya, selama proses pengevaluasian syariah, anggota DPS dapat mempengaruhi manajer untuk mengungkapkan lebih banyak informasi (Mnif dan Tahari, 2020b).

#### **2.4.3. *Cross-Membership* DPS**

Rahman and Bukair (2013) menyampaikan bahwa untuk meningkatkan efektivitas DPS, mereka tidak hanya memiliki keahlian akuntansi dan keuangan, tetapi juga harus memiliki pengalaman yang cukup. Salah satu sarana untuk meningkatkan pengalaman DPS adalah *cross-membership* (keanggotaan-silang). Menurut El-Halaby and Hussainey (2016) keanggotaan-silang berpengaruh pada peningkatan pengungkapan informasi antar perusahaan. Hal ini karena, keanggotaan-silang memberi dampak positif pada DPS berupa peningkatan pengetahuan melalui adopsi penerapan aturan syariah antar perbankan.

#### **2.5 Karakteristik Tata Kelola Perusahaan**

Tata kelola perusahaan merupakan suatu mekanisme yang diterapkan di dalam perusahaan untuk memastikan bahwa manajer tidak bersifat oportunistik, melainkan bekerja secara maksimal untuk melaksanakan tanggung jawabnya kepada pemangku kepentingan. Sifat oportunistik manajer disebabkan adanya asimetri informasi antara agen dengan prinsipal. Oleh karenanya, untuk memastikan berkurangnya asimetri informasi, agen harus mengungkapkan lebih banyak informasi (Juhmani, 2017).

Dalam pengungkapan, manajer tidak hanya berfokus pada seberapa banyak informasi itu diungkapkan, yang menjadi lebih penting apakah informasi yang diungkapkan memiliki kepatuhan dan berkualitas tinggi (Mnif dan Tahari, 2020a). Oleh karenanya, untuk memastikan agen mengungkapkan informasinya secara patuh dan memiliki kualitas informasi tinggi, peranan tata kelola perusahaan yang kuat dan efektif sangat dibutuhkan. Dalam penelitian ini, peneliti akan menguji pengaruh dewan independen, komite audit independen, dan *investment account holder*.

### **2.5.1 Komisaris Independen**

Fama (1980) menyampaikan bahwa komisaris yang dipilih oleh pemegang saham merupakan mekanisme pengendalian internal pusat untuk mengawasi manajer. Hal ini juga disampaikan Mnif and Tahari, (2020a), bahwa komisaris independen adalah mekanisme pengawasan yang ditujukan untuk memantau kinerja manajemen sekaligus mekanisme yang dapat mengurangi biaya agensi. Selain itu, keberadaan komisaris independen dianggap sebagai mekanisme yang dapat mempengaruhi praktik pengungkapan, karena mayoritas independen bekerja untuk memaksimalkan kemampuan dewan komisaris dengan memaksa manajemen memenuhi semua persyaratan pengungkapan (Haniffa dan Cooke, 2002). Selain itu, Chen dan Jaggi (2000) menambahkan untuk meningkatkan efektivitas dewan komisaris, proporsi komisaris independen juga harus ditingkatkan.

### **2.5.2 Komite Audit Independen**

Komite audit merupakan mekanisme yang dibentuk untuk memastikan integritas pelaporan keuangan melalui pemantauan dan pengendalian. Mekanisme ini sesuai dengan teori agensi, bahwa keberadaan komite audit digunakan untuk mengurangi

asimetri informasi, dan memastikan bahwa informasi yang diungkapkan agen sesuai dengan standar. Selain itu, komite audit juga memberikan layanan pemantauan kepada prinsipal untuk mengurangi oportunistik dan inisiatif agen agar tidak menghindar dari tanggung jawabnya (Garas dan ElMassah, 2018). Lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas peran komite audit, dibutuhkanlah anggota komite audit independen. Hal ini sesuai yang disampaikan El-Halaby dan Hussainey (2016) bahwa mereka tidak terafiliasi oleh apapun, sehingga akan melaksanakan tugasnya demi kepentingan perusahaan.

### **2.5.3 *Investment Account Holders***

*Investment account holders* (IAH) merupakan salah satu unsur tata kelola perusahaan dan menjadi bagian dari struktur kepemilikan. IAH merupakan bentuk kepemilikan yang bersumber dari dana nasabah. Di mana dana nasabah ini terbentuk dari kontrak partisipasi ekuitas seperti *mudharabah muthlaqoh*, *mudharabah muqoyyadah* atau *musyarakah*. IAH dalam bank syariah berwujud dana syirkah temporer.

Dana syirkah temporer merupakan dana yang bersumber dari nasabah di mana entitas syariah memiliki wewenang untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut. Pengelolaan dana ini didasarkan pada kebijakan entitas syariah dan pembatasan yang diberikan nasabah. Adapun keuntungan yang diperoleh pemilik dana atau nasabah berupa nisbah bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya (SAK Syariah, 2020).

Pengaruh IAH bagi bank syariah sangatlah besar, menurut Mnif dan Tahari (2020a) IAH menjadi sumber dana terbesar bagi bank syariah. Oleh karenanya, semakin banyak nasabah suatu bank, maka bank akan semakin diawasi oleh banyak pihak. Sehingga untuk menghindari konflik keagenan, bank akan mengungkapkan lebih banyak informasi (Farook *et al.*, 2011).

## **2.6 Karakteristik Perusahaan**

### **2.6.1. Ukuran Perusahaan**

Menurut teori keagenan, perusahaan yang lebih besar perlu mengungkapkan lebih banyak informasi kepada pemegang kepentingan. Hal ini untuk menghindari biaya agensi yang tinggi serta untuk mengurangi asimetri informasi (El-Halaby dan Hussainey, 2016). Sedangkan, menurut Watts dan Zimmerman (1978), perusahaan yang semakin besar akan menghadapi visibilitas yang lebih tinggi daripada perusahaan yang lebih kecil. Sehingga untuk menghindari risiko litigasi yang tinggi, perusahaan besar memiliki insentif lebih kuat untuk sepenuhnya mematuhi persyaratan pengungkapan yang bersangkutan (Glaum *et al.*, 2013).

### **2.6.2. Leverage**

*Leverage* merupakan rasio yang menunjukkan tingkat utang yang dimiliki suatu perusahaan. Semakin tinggi rasio *leverage* dapat berakibat pada tingginya risiko tidak tertagihnya utang perusahaan. Untuk menghindari hal tersebut, kreditor akan memberikan pengawasan ketat terhadap perusahaan (Yani dan Suputra, 2020). Menurut Debreceny dan Rahman (2005) peningkatan utang akan menciptakan biaya agensi yang tinggi. Oleh karenanya, manajer perusahaan akan berusaha melaporkan lebih banyak informasi secara sukarela untuk menurunkan biaya agensi dan membantu kreditor di dalam mengawasi perusahaan. Selain itu, menurut teori sinyal, dengan mengungkapkan lebih banyak informasi kepada kreditor akan menunjukkan bahwa perusahaan dapat memenuhi kewajibannya (El-Halaby *et al.*, 2018).



### **2.6.3. Profitabilitas**

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva (Ayuningtyas dan Sujana, 2018). Menurut teori sinyal, perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi atau kabar baik cenderung akan memberikan informasi lebih banyak kepada publik. Hal ini ditujukan kepada investor agar tertarik menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut (Alrawahi dan Sarea, 2016). Berbeda dengan teori sinyal, teori agensi berpendapat bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi diharapkan mengungkapkan lebih banyak informasi perusahaan untuk membenarkan kinerja mereka saat ini kepada pemangku kepentingan (El-Halaby dan Hussainey, 2016).

### **2.7 Penelitian Terdahulu**

El-Halaby dan Hussainey (2016) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan kepatuhan syariah. Dalam penelitiannya El-Halaby dan Hussainey (2016) mencoba mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan syariah melalui tiga topik bank syariah, antara lain (1) topik yang berkaitan dengan DPS, (2) topik yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan dan (3) topik yang berkaitan dengan kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini menggunakan 43 bank syariah yang berada di MENA dengan periode 2011-2013. Hasil daripada penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pengungkapan kepatuhan syariah sebesar 65% yang diperoleh dari rata-rata bank syariah di Jordania. Sedangkan bagi bank syariah yang berada di Bahrain, memiliki rata-rata pengungkapan sebesar 56%. Hasil ini tentunya cukup mengejutkan, karena kepatuhan terhadap standar AAOIFI menjadi perkara yang wajib di negara tersebut. Selanjutnya faktor-faktor yang signifikan

terhadap tingkat pengungkapan kepatuhan syariah di antaranya usia bank, ukuran bank, keberadaan departemen audit syariah, ukuran DPS, keanggotaan-silang DPS dan keikutsertaan DPS di AAOIFI. Dari penelitiannya ini El-Halaby dan Hussainey (2016) belum mampu menunjukkan hubungan antara karakteristik tata kelola dengan tingkat pengungkapan. Lebih lanjut, El-Halaby dan Hussainey (2016), juga menyarankan bahwa untuk penelitian selanjutnya, perlu untuk mencoba menguji variabel lain seperti komite audit, leverage dan struktur kepemilikan.

Alrawahi dan Sarea (2016) meneliti tentang tingkat kepatuhan perusahaan yang terdaftar di bursa Bahrain terhadap IAS 1. Adapun faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah karakteristik perusahaan seperti ukuran perusahaan, leverage, umur perusahaan, ukuran perusahaan audit, profitabilitas, kategori industri dan likuiditas. Alasan Alrawahi dan Sarea (2016) menguji kepatuhan terhadap IAS 1, dikarenakan IAS 1 merupakan standar yang membahas tentang penyajian laporan keuangan yang digunakan oleh investor lokal dan investor domestik. Hasil daripada penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan yang terdaftar di Bursa Bahrain memiliki tingkat kepatuhan sebesar 83%. Adapun faktor-faktor yang signifikan dalam penelitian ini adalah ukuran KAP dan tingkat profitabilitas.

Juhmani (2017) meneliti mengenai hubungan karakteristik tata kelola perusahaan terhadap tingkat kepatuhan perusahaan terhadap IFRS. Sampel dari penelitian ini adalah perusahaan yang berada di Bahrain. Penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa kesuksesan penerapan suatu standar sangat dipengaruhi oleh seberapa baik tata kelola perusahaan dijalankan. Adapun variabel yang diuji dalam penelitian ini di antaranya *board independence*, ukuran dewan direksi, komite audit independen, kepemilikan blok

saham, dualitas CEO, kepemilikan manajerial dan kepemilikan pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga memasukkan karakteristik perusahaan. Di antaranya ukuran perusahaan, profitabilitas, KAP BIG 4, *leverage* dan jenis industri.

Hasil daripada penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata sampel memiliki tingkat kepatuhan terhadap IFRS sebesar 80.73%. Adapun variabel yang berpengaruh signifikan dalam penelitian ini di antaranya *board independence*, komite audit independen, dualitas CEO, profitabilitas, KAP Big 4 dan jenis industri. Salah satu hal menarik dalam penelitian ini adalah struktur kepemilikan tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan. Juhmani (2017) berpendapat, struktur kepemilikan yang terkonsentrasi pada pihak tertentu, menyebabkan sedikitnya informasi yang diungkapkan ke publik. Selain itu, Juhmani (2017) juga menyarankan bagi penelitian selanjutnya untuk menguji hubungan variabel dengan model dinamis.

Sellami dan Tahari (2017) meneliti mengenai tingkat kepatuhan bank syariah terhadap standar akuntansi pengungkapan yang diterapkan oleh bank syariah yang berada di MENA selama 2011 – 2013. Adapun dalam penyusunan indeks pengungkapan, Sellami dan Tahari (2017) mendasarkannya pada IFRS 7, FAS 1 dan FAS 5. Adapun variabel yang diuji dalam penelitian ini adalah karakteristik perusahaan, seperti ukuran perusahaan, jenis auditor, status pencatatan, keberadaan komite audit, usia perusahaan dan negara domisili. Hasil daripada penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kepatuhan bank syariah yang berada di MENA sebesar 70%. Sedangkan variabel-variabel yang mempengaruhi tingkat kepatuhan di antaranya status pencatatan, komite audit, usia perusahaan dan negara domisili.

Garas dan ElMassah (2018) meneliti mengenai hubungan tata kelola perusahaan terhadap tingkat pengungkapan CSR. Asumsi yang dibangun dalam penelitian ini, bahwa konsep tata kelola perusahaan memiliki hubungan erat dengan CSR. Hal ini didasarkan pada teori legitimasi, di mana adanya mekanisme tata kelola perusahaan yang baik akan menghasilkan transparansi, akuntabilitas dan kejujuran. Sehingga ke depannya akan mendapatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan. Hal ini berlaku sama pada apa yang dibawa CSR, bahwa pelaksanaan CSR nantinya mengarah pada legitimasi. Bahkan dalam literatur lain, disebutkan bahwa untuk mendapatkan CSR yang baik perlu memiliki mekanisme tata kelola perusahaan yang baik. Adapun variabel yang digunakan dalam menguji hubungan tata kelola perusahaan dengan pengungkapan CSR, di antaranya kepemilikan manajerial, konsentrasi kepemilikan, *board independence*, dualitas CEO, dan komite audit independen. Selain itu, Garas dan ElMassah (2018) juga memasukkan variabel kontrol dalam penelitiannya. Hasil daripada penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, konsentrasi kepemilikan, *board independence*, dualitas CEO berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan CSR.

El-Halaby *et al.* (2018) meneliti tentang tingkat kepatuhan akuntabilitas bank syariah di berbagai negara. Dalam penelitiannya El-Halaby *et al.* (2018) mencoba mengukur tingkat kepatuhan bank syariah pada tiga aspek, di antaranya aspek syariah, keuangan dan sosial. Adapun variabel yang diuji dalam penelitian ini adalah karakteristik bank syariah meliputi profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, ukuran KAP, keberadaan audit internal, adopsi AAOIFI dan keberadaan departemen audit syariah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik perusahaan seperti

profitabilitas, ukuran perusahaan, ukuran KAP, adopsi AAOIFI, dan departemen audit syariah dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan akuntabilitas bank syariah.

Mnif dan Tahari (2020a) meneliti tentang pengaruh tata kelola perusahaan terhadap tingkat kepatuhan syariah yang ditetapkan oleh AAOIFI. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 54 bank syariah. Asumsi penelitian ini, bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan yang efisien dan transparansi akan menyebabkan pengungkapan yang ekstensif dalam laporan tahunan bank syariah. selain itu dalam penelitian ini, Mnif dan Tahari (2020a) menguji pengaruh komite audit dengan keahlian akuntansi dan keuangan terhadap tingkat pengungkapan. Adapun variabel yang diuji dalam penelitian ini, di antaranya, ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, dualitas CEO, ukuran komite audit, independensi komite audit, keahlian komite audit, spesialisasi industri auditor, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan institusional, kepemilikan pemerintah. Variabel kontrol, ukuran bank, profitabilitas, leverage, usia bank, status pencatatan,

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kepatuhan sampel terhadap AAOIFI GSs sebesar 51,8%. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan di antaranya: komite audit independent; keahlian anggota komite audit dalam bidang akuntansi, keuangan dan industri perbankan, spesialisasi industri auditor, ukuran bank dan konsentrasi kepemilikan. Adapun variabel yang tidak berpengaruh di antaranya ukuran dewan, independensi dewan komisaris, dualitas CEO, kepemilikan institusional, kepemilikan pemerintah, profitabilitas, leverage dan usia.

Mnif dan Tahari (2020b) meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan kepatuhan terhadap standar tata kelola perusahaan yang diterbitkan oleh AAOIFI. Dalam penelitian ini, Mnif dan Tahari (2020b) mencoba untuk membuktikan

pengaruh jumlah remunerasi yang diterima DPS, dan keahlian DPS dalam bidang akuntansi keuangan, terhadap tingkat kepatuhan. Selain itu, Mnif dan Tahari (2020b) juga menguji hubungan antara IAH (*investment account holders*) terhadap tingkat pengungkapan. Dimasukkannya IAH dalam penelitian ini, menurut Mnif dan Tahari (2020b) sebagai gambaran kepemilikan nasabah atas bank syariah, meskipun akun IAH tidak sekuat penyertaan modal. Adapun variabel yang diuji dalam penelitian ini, di antaranya remunerasi DPS, keahlian DPS, keberadaan departemen audit syariah, tingkat pemegang akun investasi/ IAH. Variabel kontrol dalam penelitian ini ukuran perusahaan, profitabilitas dan leverage. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa rata-rata pengungkapan sebesar 52%, dan variabel yang memiliki hubungan di antaranya remunerasi DPS, keahlian anggota DPS, IAH, dan keberadaan departemen audit syariah.

## **2.8 Kerangka Pemikiran**

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti mengacu pada penelitian El-Halaby dan Hussainey (2016). Di mana dalam penelitian El-Halaby dan Hussainey (2016) memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Mereka mencoba menganalisis determinan tingkat pengungkapan melalui tiga topik utama yang berkaitan dengan bank syariah, di antaranya topik yang berkaitan dengan DPS, topik yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan dan topik yang berkaitan dengan kinerja keuangan. Hasil dari penelitian El-Halaby dan Hussainey (2016) menunjukkan bahwa topik yang berkaitan dengan DPS seperti ukuran DPS, keanggotaan-silang DPS dan keanggotaan DPS di AAOIFI berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan bank syariah. Hal ini disusul oleh topik yang berkaitan dengan kinerja keuangan, seperti usia bank, ukuran perusahaan dan keberadaan departemen audit syariah. Sedangkan, untuk topik yang berkaitan dengan tata

kelola perusahaan, seperti jumlah pemegang saham, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dualitas CEO dan independensi dewan komisaris, tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan. Hal ini menjadi menarik, karena menurut teori agensi, asimetri informasi dapat berkurang apabila memiliki tata kelola perusahaan yang efisien. Terlebih lagi, tata kelola perusahaan diduduki oleh mereka yang dapat menentukan kebijakan akuntansi dalam suatu institusi. Oleh karena itu, peneliti akan mencoba meneliti kembali faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan bank syariah di Indonesia dengan menguji hubungan tiga topik utama yang berkaitan dengan bank syariah, seperti topik yang berkaitan dengan DPS, topik yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan dan topik yang berkaitan dengan kinerja keuangan. Adapun faktor-faktor yang akan diuji dalam penelitian ini di antaranya remunerasi DPS; keanggotaan-silang DPS di lembaga keuangan bank lain; komisaris independen; komite audit independen; *investment account holder* (IAH); dan leverage.

Rasionalisasi pemilihan variabel-variabel tersebut, di antaranya: remunerasi DPS. Dalam penelitian El-Halaby dan Hussainey (2016), mereka mencoba menguji keahlian DPS terhadap tingkat kepatuhan, salah satu variabel yang diuji adalah keahlian DPS yang diukur dengan menjadi anggota AAOIFI. Ukuran yang ditetapkan oleh El-Halaby dan Hussainey (2016) tentunya belum dapat diujikan di bank syariah Indonesia, hal ini karena sebagian besar DPS yang berada di bank syariah, tidak menjadi anggota AAOIFI. Oleh karena itu, peneliti mencoba remunerasi DPS sebagai penggantinya. Hal ini dikarenakan menurut, Ferrero-Ferrero *et al.* (2012) tingkat remunerasi yang diberikan dapat menjadi ukuran keefektifan kinerja, keterampilan yang dimiliki oleh dewan dan upaya yang dilakukan dewan dalam suatu entitas. Selain itu, Razali *et al.* (2018) juga menambahkan

pemberian remunerasi yang tinggi dapat menjaga motivasi dewan untuk memberikan hasil yang baik. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa remunerasi DPS dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan (Mnif dan Tahari, 2020b).

Keanggotaan-silang DPS merupakan salah satu aspek penting yang dimiliki DPS, hal ini karena dapat meningkatkan kualitas dan pengetahuan DPS terkait permasalahan yang dihadapi bank syariah. Dalam penelitian sebelumnya ditemukan bahwa keanggotaan silang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan (Farook *et al.*, 2011; Rahman dan Bukair, 2013; El-Halaby dan Hussainey, 2016). Meskipun demikian, belum banyak dijumpai literatur yang membahas keanggotaan-silang DPS di Indonesia. Selain itu, penelitian terdahulu mengukur keanggotaan-silang dengan model dummy. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengukur keanggotaan-silang dengan cara melihat persentase anggota DPS yang duduk pada lebih satu bank syariah. Di mana ukuran ini mengikuti apa yang telah diajukan Nomran *et al.* (2018) dalam penelitiannya.

Komisaris independen, menurut teori keagenan dengan masuknya komisaris independen di dalam suatu perusahaan akan membuat informasi lebih transparan. Hal ini karena komisaris independen akan bekerja memenuhi persyaratan pengungkapan yang telah ditetapkan. Selain itu, komisaris independen dapat juga berperan sebagai penghubung antara perusahaan dengan pihak eksternal. Penelitian sebelumnya menemukan bahwa keberadaan komisaris independen akan membuat bank lebih transparan dengan mengungkapkan informasi (Juhmani, 2017; Mnif dan Tahari, 2020a). Hasil berbeda ditemukan oleh El-Halaby dan Hussainey (2016), di mana komisaris independen tidak memiliki hubungan signifikan dengan pengungkapan.



Komite audit independen, El-Halaby dan Hussainey (2016) menyarankan untuk penelitian selanjutnya agar menguji peran komite audit independen. Salah satu tugas komite audit adalah untuk memastikan terdapat integritas dalam pelaporan keuangan melalui pemantauan dan pengendalian. Hal ini sejalan dengan teori keagenan, bahwa adanya komite audit untuk mengurangi asimetri informasi dan mengurangi biaya keagenan. Dalam penelitian sebelumnya, ditemukan bahwa peranan komite audit dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan. Hal ini seperti yang ditemukan oleh Sellami dan Fendri (2017); Mnif dan Tahari (2020a). Hasil berbeda ditemukan oleh Juhmani (2017) dan Grassa *et al.* (2018).

*Investment account holders* (IAH). Penelitian yang dilakukan oleh El-Halaby dan Hussainey (2016) menemukan bahwa variabel-variabel kepemilikan tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan. Oleh karenanya, peneliti akan mencoba meneliti hubungan IAH dengan tingkat pengungkapan. IAH merupakan suatu hal yang unik dimiliki oleh bank syariah, di mana IAH tidak boleh dicatat sebagai kewajiban dan tidak boleh diakui sebagai penyertaan modal seperti saham. Tetapi IAH menjadi salah satu sumber terbesar dalam mengumpulkan dana operasional. Sehingga para pemegang akun IAH ini patut untuk diperhatikan. Adapun penelitian terdahulu yang menemukan pengaruh signifikan IAH terhadap tingkat pengungkapan di antaranya (Farook *et al.*, 2011); Grassa *et al.* (2018). Abdullah *et al.* (2015) dan Mnif dan Tahari (2020a). Meskipun demikian, belum banyak literatur di Indonesia yang meneliti tentang pengaruh IAH pada bank syariah.

*Leverage* merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar suatu perusahaan dibiayai dengan utang. Menurut teori kontrak utang, semakin tinggi rasio utang yang

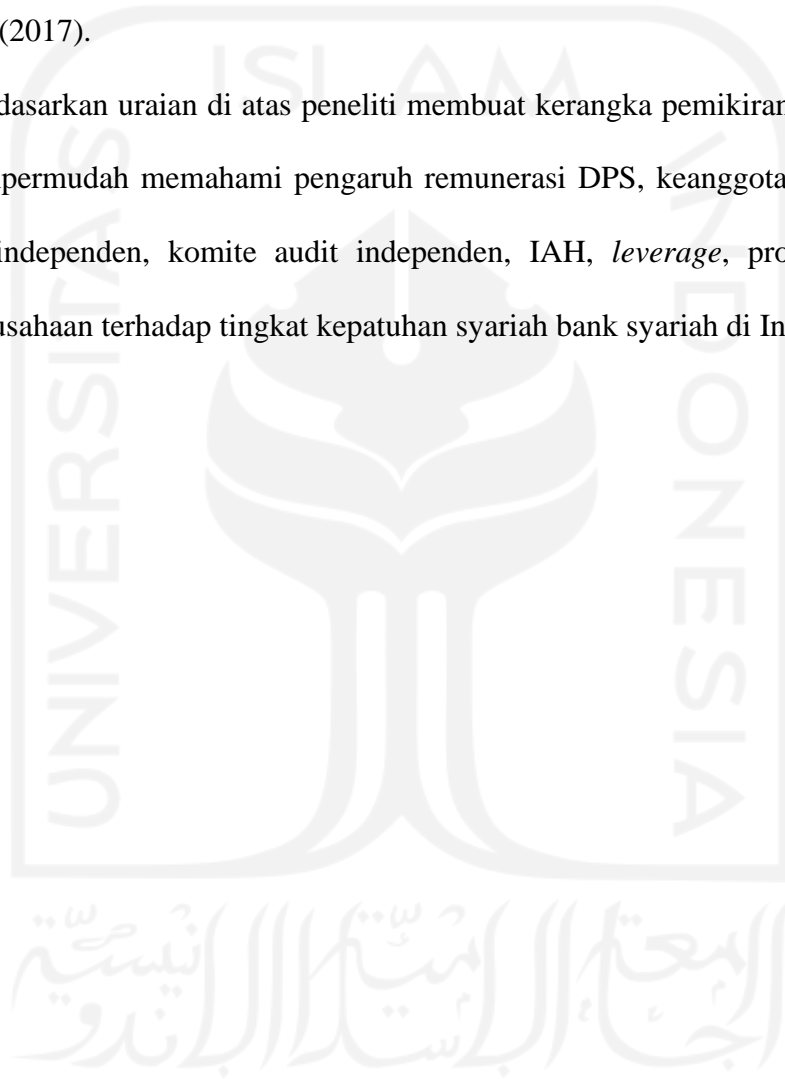
dimiliki suatu perusahaan akan membuatnya menyajikan lebih banyak informasi. Hal ini untuk menghindari undervaluasi pada bank, yang nantinya akan berdampak buruk pada kegiatan operasional bank (Januarti, 2004). Oleh karenanya informasi yang dimuat dalam laporan keuangan dapat dijadikan media komunikasi kepada kreditur. Penelitian yang dilakukan oleh El-Halaby dan Hussainey (2016) menyarankan untuk menguji pengaruh *leverage* terhadap tingkat pengungkapan. Adapun penelitian terdahulu menemukan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan seperti Juhmani (2017); Garas (2017); El-halaby *et al.* (2018) dan Mnif dan Tahari (2020b).

Profitabilitas adalah kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Menurut teori pensinyalan, suatu perusahaan dengan rasio profitabilitas tinggi, akan lebih mengungkapkan banyak informasi sebagai sinyal kepada investor, bahwa perusahaan dapat memaksimalkan nilai pemegang saham. Berdasarkan penelitian terdahulu, ditemukan bahwa profitabilitas mempengaruhi tingkat pengungkapan di antaranya Alrawahi dan Sarea (2016); Juhmani (2017) dan El-Halaby *et al.* (2018). Meskipun demikian terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan tidak adanya hubungan antara profitabilitas dengan tingkat pengungkapan, seperti yang ditemukan oleh El-Halaby dan Hussainey (2016); Garas (2017) Mnif dan Tahari (2020a) dan Mnif dan Tahari (2020b).

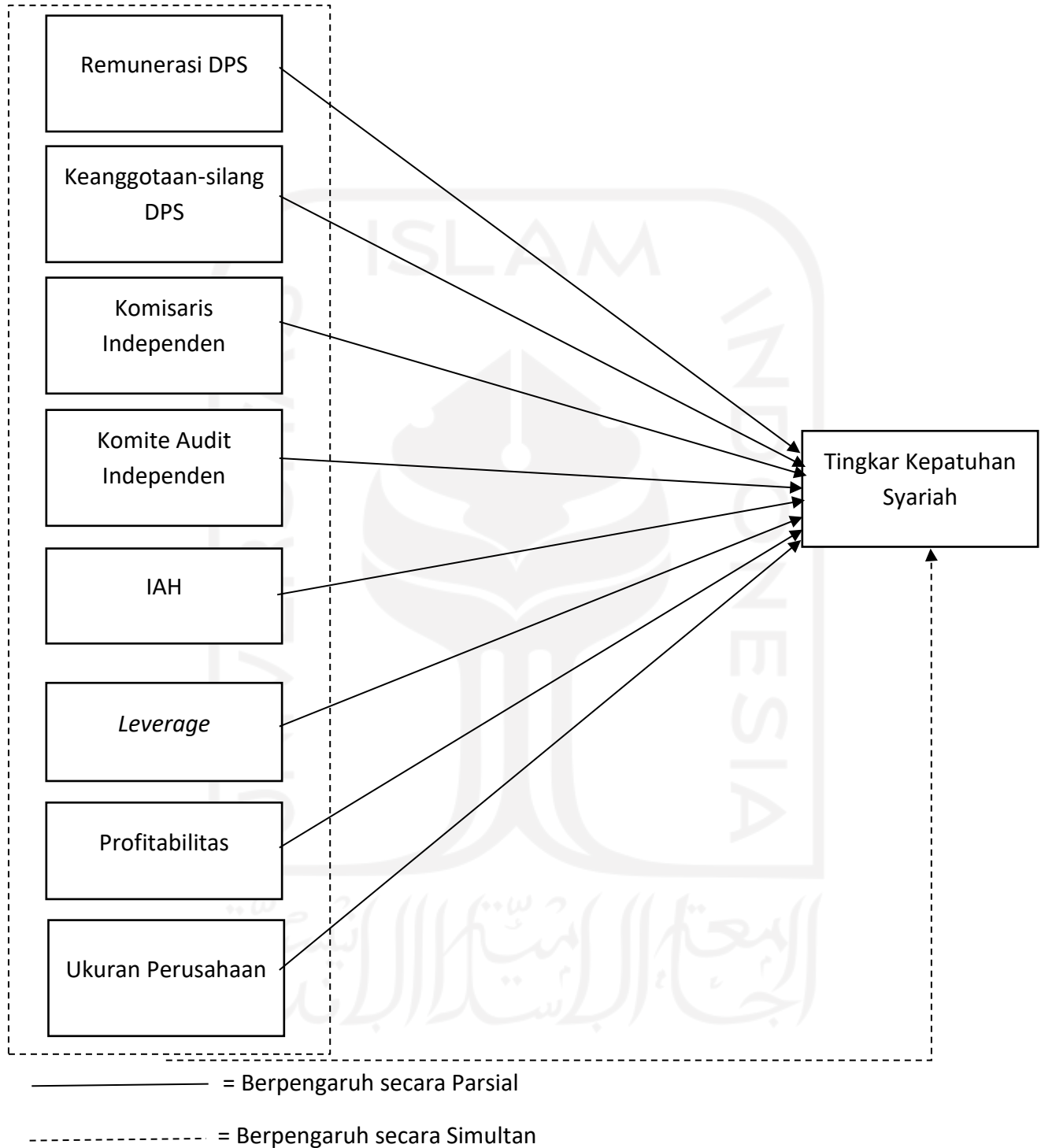
Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan total aset, hal ini untuk menggambarkan seberapa besar suatu perusahaan. Hubungan ukuran perusahaan dengan pengungkapan dijelaskan dalam beberapa teori, misalnya teori keagenan. Menurut teori keagenan, perusahaan besar akan dituntut oleh banyak pihak agar mengungkapkan informasi. Hal ini karena semakin besar suatu perusahaan, maka semakin besar juga pihak-pihak yang mengawasinya, seperti pemerintah dan masyarakat utamanya para

*stakeholders*. Adapun penelitian terdahulu, menemukan hubungan signifikan antara ukuran perusahaan terhadap tingkat pengungkapan, di antaranya El-Halaby dan Hussainey (2016); Garas (2017); El-Halaby *et al.* (2018) dan Mnif dan Tahari (2020b). Hal sebaliknya ditemukan oleh Alrawahi dan Sarea (2016); Juhmani (2017); dan Sellami dan Tahari (2017).

Berdasarkan uraian di atas peneliti membuat kerangka pemikiran dengan tujuan untuk mempermudah memahami pengaruh remunerasi DPS, keanggotaan-silang DPS, komisaris independen, komite audit independen, IAH, *leverage*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap tingkat kepatuhan syariah bank syariah di Indonesia.



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**



## **2.9 Pengembangan Hipotesis**

### **2.9.1. Remunerasi Dewan Pengawas Syariah**

Teori keagenan menjelaskan bahwa hubungan antara remunerasi agen (direktur) dan manfaat yang diterima dari prinsipal (pemegang saham), bahwa remunerasi yang tinggi dapat memotivasi dan mempertahankan direktur untuk menjalankan tugasnya dan bekerja lebih keras untuk kepentingan pemegang saham (Razali *et al.*, 2018). Watts dan Zimmerman (1978) juga menjelaskan bahwa konflik kepentingan dapat diselesaikan dengan menawarkan kontrak kompensasi yang menarik berdasarkan kinerja organisasi.

Dengan memperluas argumen ini ke DPS, remunerasi yang diberikan kepada anggota DPS diharapkan dapat mempengaruhi kualitas pengawasan. Selain itu, remunerasi yang diterima oleh DPS dapat digunakan sebagai ukuran kinerja, karena remunerasi yang diberikan biasanya didasarkan pada keterampilan dan upaya yang telah dilakukan DPS. Selain itu, DPS juga berhak mendapatkan kompensasi karena mereka sudah mendedikasikan waktunya untuk mengeluarkan fatwa dan memberikan arahan syariah. Remunerasi ini juga mendorong anggota DPS untuk mencurahkan waktu bagi bank syariah guna menghormati komitmen kontrak mereka (Mnif dan Tahari, 2020b).

Jumlah remunerasi besar yang dibayarkan kepada DPS dapat meningkatkan upaya dan kualitas pekerjaan mereka. Menurut Alman (2012), pemberian remunerasi yang tinggi dapat mempertahankan anggota DPS berkualitas tinggi dan karenanya, berdampak juga pada kualitas pelaporan keuangan yang berkualitas tinggi. Dengan demikian, pembayaran remunerasi DPS yang tinggi dapat menjadi konstruksi yang lebih baik untuk kualitas audit syariah dan meningkatkan cakupan pengungkapan bank syariah. Adapun hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H1: Remunerasi yang diterima DPS berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan syariah bank syariah di Indonesia

### **2.9.2. *Cross-membership* Anggota Dewan Pengawas Syariah**

*Cross-membership* (keanggotaan-silang) merupakan situasi di mana anggota DPS duduk di beberapa DPS (Abdullah *et al.*, 2013). Keanggotaan silang ini menimbulkan kekhawatiran berupa kerahasiaan dan konflik kepentingan. Hal ini dikarenakan, DPS memiliki akses ke informasi rahasia dan sensitif yang mungkin berdampak pada persaingan antar bank syariah. Selain itu, keanggotaan silang dapat membuat DPS memiliki waktu yang sedikit untuk mencurahkan kinerjanya untuk satu bank syariah (Garas, 2012).

Terlepas dari argumen tersebut, Dahya *et al.* (1996) menyampaikan bahwa keanggotaan silang dapat memberikan pengalaman yang lebih banyak bagi anggota DPS. Hal ini memungkinkan mereka untuk membahas lebih banyak permasalahan yang dihadapi bank syariah, akibatnya pengetahuan dan wawasan anggota DPS semakin banyak (Farook *et al.*, 2011). Lebih lanjut Haniffa dan Cooke (2002) menambahkan bahwa keanggotaan silang dapat meningkatkan transparansi bagi bank syariah. Alasannya adalah pertama, anggota dengan keanggotaan silang dapat membuat perbandingan dari pengetahuan yang diperoleh antar bank; kedua, keputusan di suatu bank akan mempengaruhi keputusan di bank lain.

Beberapa penelitian sebelumnya menemukan bahwa keanggotaan silang DPS mempengaruhi luasnya pengungkapan informasi bank syariah seperti Farook *et al.* (2011); (Abdullah *et al.*, 2013); El-Halaby dan Hussainey (2016). Adapun hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H2: Keanggotaan silang DPS berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan syariah bank syariah di Indonesia.

### **2.9.3. Komisaris Independen**

Dalam mekanisme tata kelola perusahaan, komisaris diposisikan sebagai pihak yang mengawasi dan mengarahkan manajer untuk memuaskan kepentingan pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976). Sehingga, keefektifitasan komisaris sangatlah diperlukan. Forker (1992) berpendapat bahwa efektivitas komisaris ditentukan oleh komposisinya. Oleh karena itu, memasukkan komisaris independen ke dalam dewan komisaris dapat menjadi solusi dalam meningkatkan efektivitas dewan. Alasannya, karena komisaris independen tidak terafiliasi oleh pihak manapun. Selain itu keberadaan direktur independen akan meningkatkan pengungkapan kualitatif yang lebih tinggi, melalui pengawasan yang lebih baik (Jo dan Harjoto, 2011). Sejalan dengan ini, Rahman dan Bukair (2015) menyampaikan bahwa komisaris independen cenderung lebih mendorong manajer untuk terlibat pada lebih banyak aktivitas sosial dan memberikan pengungkapan yang berkualitas tinggi.

Beberapa penelitian telah menemukan bahwa keberadaan komisaris independen dapat meningkatkan pengungkapan informasi (Khan *et al.*, 2013; Das *et al.*, 2015; Juhmani, 2017). Adapun hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H3: Keberadaan komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan syariah bank syariah di Indonesia

### **2.9.4. Komite Audit Independen**

Menurut teori keagenan, keberadaan komisaris independen di dalam komite audit dapat meningkatkan efektivitas komite audit dalam mengawasi dan mengurangi peluang

bagi manajemen untuk bersikap oportunistik dengan menyembunyikan informasi (Cotter dan Silvester, 2003). Sejalan dengan ini, Juhmani (2017) menyampaikan bahwa komite audit independen merupakan persyaratan yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya secara obyektif. Selanjutnya, Klein (2002) berpendapat bahwa, cara untuk membuat komite audit yang independen dibutuhkan keberadaan direktur independen. Semakin besar proporsi direktur independen, maka semakin mudah bagi dewan untuk memiliki komite audit independen. Buah daripada hal tersebut adalah terciptanya pengawasan pelaporan keuangan yang efektif.

Studi mengenai hubungan komite audit independen dengan tingkat kepatuhan telah dilakukan oleh beberapa peneliti seperti Al-Akra *et al.*, (2010); Sellami dan Fendri (2017); Mnif dan Tahari (2020a), di mana mereka menemukan bahwa komite audit independen berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan. Adapun hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H4: Komite audit independen berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan syariah bank syariah di Indonesia.

#### **2.9.5. *Investment Account Holders***

Dalam struktur kepemilikan, bank syariah memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan bank konvensional. Di mana bank syariah memiliki *investment account holders* (IAH) atau dana syirkah temporer. IAH merupakan sumber dana dari nasabah yang terbentuk dari kontrak partisipasi ekuitas (*mudharabah* dan *musyarakah*) (Aggarwal dan Yousef, 2000).

IAH menjadi sumber dana terbesar untuk bank syariah, hal ini karena investor syariah cenderung menginvestasikan dananya pada IAH daripada saham. Berkaitan



dengan IAH, Abdullah (2015) menyampaikan bahwa risiko yang dihadapi pemegang akun IAH adalah tidak memilikinya hak suara formal. Sehingga bisa saja dalam konflik keagenan antara bank, pemegang saham dan pemegang akun IAH, pemegang akun IAH menjadi pihak yang dirugikan. Oleh karenanya untuk mengurangi kekhawatiran atas kurangnya perlindungan pemegang akun IAH, bank syariah perlu memberikan pengungkapan yang lebih transparan. Archer *et al.* (2009) menambahkan meskipun para pemegang akun IAH tidak memiliki hak suara formal, tetapi keberadaan mereka seperti halnya pemegang saham yang dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi. Hal ini karena IAH memberikan proporsi dana terbesar bagi bank syariah.

Mnif dan Tahari (2020a) berpendapat bahwa efek relatif besarnya IAH pada bank syariah membuat mereka lebih mematuhi prinsip-prinsip syariah. Hal ini didukung oleh temuan Farook *et al.* (2011); Grassa *et al.* (2018) yang menunjukkan adanya hubungan positif antara IAH dengan tingkat pengungkapan. Adapun hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H5: *Investment account holder* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan syariah bank syariah di Indonesia.

#### **2.9.6. Leverage**

*Leverage* merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar modal kerja suatu perusahaan dibiayai dengan utang (Alrawahi dan Sarea, 2016). Teori agensi mengasumsikan bahwa perusahaan dengan rasio utang yang tinggi cenderung mentransfer kekayaan mereka kepada pemegang saham dari pada pemegang obligasi. Hal ini dimaksudkan agar perusahaan mendapatkan tambahan modal dari pemegang saham (Omar dan Simon, 2011). Situasi seperti ini tentunya berdampak negatif bagi pemegang

obligasi, karena pembayaran dividen yang tinggi dapat mengurangi aktiva yang tersedia untuk pembayaran kepada pemegang obligasi (Sari, 2002). Oleh karena itu, untuk menghindari sifat oportunistik manajer, pemegang obligasi menciptakan kontrak utang dan meningkatkan pengawasan kepada manajer. Dampak daripada ini adalah meningkatnya biaya agensi (Mnif dan Znazen, 2020) Sehingga untuk mengurangi biaya agensi, perusahaan dengan rasio utang yang tinggi cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi dengan meyakinkan pemegang obligasi bahwa kontrak utang mereka terlindungi. Selain itu, pengungkapan informasi yang luas juga dimaksudkan sebagai sinyal, bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk mengelola risiko secara efektif dan efisien (Srairi, 2018). Adapun hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H6: Tingkat *leverage* yang tinggi berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan syariah bank syariah di Indonesia.

### **2.9.7. Profitabilitas**

Menurut Chavent *et al.* (2006) perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi cenderung untuk memberikan informasi yang lebih luas secara komparatif. Hubungan antara tingkat profitabilitas dan luasnya pengungkapan informasi ini dapat dijelaskan melalui teori agensi dan teori sinyal. Di mana kedua teori itu menyatakan bahwa perusahaan yang sangat menguntungkan cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi untuk meningkatkan kepercayaan pemegang saham. Selanjutnya, manajer akan mendapatkan kompensasi lebih dari kinerja tersebut (Marston dan Polei, 2004).

Berdasarkan penelitian sebelumnya, beberapa peneliti menemukan hubungan positif antara tingkat profitabilitas terhadap luasnya pengungkapan informasi yang disajikan oleh bank (Haniffa dan Cooke, 2002; Juhmani, 2017; Alrawahi dan Sarea,

2016). Meskipun demikian terdapat penelitian yang menunjukkan hubungan sebaliknya seperti El-Halaby dan Hussainey (2016); Garas dan ElMassah (2018). Menurut Haniffa (2002), bagi bank syariah memberikan pengungkapan penuh merupakan bentuk akuntabilitas kepada Allah SWT, sehingga dalam situasi apapun bank syariah harus tetap melakukan pengungkapan (El-Halaby *et al.*, 2018). Adapun hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H7: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan syariah bank syariah di Indonesia

#### **2.9.8. Ukuran Perusahaan**

Dalam penelitian terdahulu, beberapa peneliti menemukan hubungan yang signifikan antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan kepatuhan (El-Halaby dan Hussainey, 2016; Garas dan ElMassah, 2018; El-Halaby *et al.*, 2018). Hal ini dapat dijelaskan melalui teori keagenan, di mana perusahaan besar yang memiliki sumber daya besar akan lebih diperhatikan oleh banyak kalangan. Sehingga untuk mengurangi asimetri informasi, perusahaan akan lebih banyak mengungkapkan informasi. Selain itu, perusahaan besar juga memiliki inisiatif lebih kuat untuk mematuhi persyaratan pengungkapan, dengan tujuan menghindari tekanan dari pengawasan publik dan investor (Watts dan Zimmerman, 1990). Pengungkapan kepatuhan selanjutnya akan menjadi medium untuk mendapatkan legitimasi dari komunitas masyarakat (Sencal dan Asutay, 2020). Adapun hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H8: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan syariah bank syariah di Indonesia.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari *annual report* atau laporan tahunan yang dipublikasikan melalui website resmi masing-masing bank syariah. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif berupa data panel (*pooled data*) yang terdiri dari *time series* selama 6 tahun yaitu 2015-2020 dan data *cross-section* sebanyak 14 bank syariah.

#### **3.2 Populasi dan Sampel**

Populasi yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah (BUS) di Indonesia dalam rentang waktu 2015-2020. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu metode pemilihan sampel didasarkan pada kriteria tertentu untuk memperoleh sampel yang representatif terhadap populasi. Adapun kriteria sampel sebagai berikut:

1. Bank syariah yang telah menerbitkan laporan tahunannya pada website resmi masing-masing bank syariah.
2. Menerbitkan laporan tahunannya selama periode 2015-2020 dan telah diaudit.
3. Laporan tahunannya berakhir pada 31 Desember.

#### **3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

##### **3.3.1. Variabel Dependen**

Variabel dependen merupakan bentuk variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel independen atau bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini berupa tingkat pengungkapan atau kepatuhan syariah yang diukur menggunakan indikator yang telah

diusulkan oleh El-Halaby dan Hussainey (2016). Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan syariah berjumlah 60 item, di mana masing-masing indikator akan dinilai secara *dummy*, yaitu bernilai 1 jika indikator tersebut berlaku dan dijalankan di bank syariah terkait, dan bernilai 0 apabila indikator tersebut tidak dijalankan. Selanjutnya, setelah seluruh indikator diberi bobot, maka seluruh bobot indikator yang terpenuhi dijumlah dan dibagi dengan jumlah skor standar, atau dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Indeks Kepatuhan Syariah} = \frac{\text{Total skor item terpenuhi}}{\text{Jumlah skor standar}}$$

### 3.3.2. Variabel Independen

#### a. Remunerasi DPS

Remunerasi merupakan segala bentuk imbalan yang diberikan perusahaan kepada pegawai atas kinerja yang telah diberikan. Menurut teori keagenan, pemberian remunerasi yang tinggi dapat memotivasi kinerja dan mempertahankan kerja keras pegawai. Sejalan dengan ini, Mnif dan Tahari (2020b) berpendapat bahwa pemberian remunerasi bagi DPS dapat meningkatkan pengawasan terhadap operasional bank syariah. Selain itu, pemberian remunerasi yang tinggi dapat mendorong DPS untuk lebih mencurahkan waktunya dalam aktivitas bank syariah, sehingga akan meningkatkan kualitas pelaporan bank syariah. Adapun alat yang digunakan untuk mengukur remunerasi DPS telah diusulkan oleh Grassa dan Matoussi, (2014); Mnif dan Tahari (2020b) dengan rumus:

$$\text{Log Total Remunerasi}$$

b. *Cross-membership* DPS

*Cross-membership* atau keanggotaan-silang merupakan kondisi di mana DPS duduk di lebih dari satu bank syariah. Menurut Panjaitan dan Sriwiyanti (2020) keanggotaan-silang DPS dapat meningkatkan pengalaman kerja, dan memungkinkan membuat mereka melakukan pengawasan dengan lebih baik. Adanya keanggotaan silang diharapkan bank syariah dapat lebih memenuhi pengungkapan yang dipersyaratkan dalam laporannya (Abdullah *et al.*, 2013). Variabel ini diukur dengan menggunakan persentase anggota DPS yang diwaktu bersamaan duduk di bank syariah lain (Nomran *et al.*, 2018).

c. Komisaris Independen

Menurut Haniffa dan Cooke (2002) komisaris independen merupakan mekanisme tata kelola perusahaan yang ditujukan untuk mengurangi biaya agensi. Komisaris independen ditugaskan untuk mengarahkan manajer agar bersikap lebih transparan dengan lebih banyak mengungkapkan informasi kepada publik utamanya pemegang saham. Menurut Ruslim dan Santoso (2018) efektivitas komisaris independen dipengaruhi oleh proporsi komisaris dalam dewan komisaris. Semakin tinggi proporsinya, diharapkan kinerja dewan komisaris menjadi lebih baik, sehingga meningkatkan pengungkapan pada laporan bank syariah. Berdasarkan hal tersebut, variabel ini akan diproksikan dengan proporsi komisaris independen di dalam dewan komisaris (El-Halaby dan Hussainey, 2016).

d. Komite Audit Independen

Komite audit merupakan badan independen di dalam perusahaan yang bertugas untuk memastikan pelaporan keuangan memiliki integritas dan memenuhi standar pengungkapan. Tujuan dibentuknya komite audit adalah untuk mengurangi oportunistik manajer yang timbul sebab adanya asimetri informasi. Dalam praktiknya, komite audit melakukan pengawasan dan pengendalian internal terhadap aktivitas bank, dan untuk meningkatkan efektivitas fungsi ini, diperlukan pihak independen. Semakin besar proporsi pihak independent, diharapkan bank syariah lebih patuh terhadap persyaratan pengungkapan yang ada. Variabel ini diproksikan dengan proporsi komite audit independen di dalam komite audit, atau diformulasikan sebagai (Juhmani, 2017):

$$\text{Proporsi Komite Audit Independen} = \frac{\text{Jumlah Komite Audit Independen}}{\text{Jumlah Komite Audit}}$$

e. *Investment Account Holders*

*Investment Account Holders* merupakan struktur kepemilikan pada bank syariah yang dananya bersumber dari dana nasabah. Pengaruh *Investment Account Holder* (IAH) pada bank syariah sangatlah signifikan, hal ini dikarenakan hampir seluruh dana yang dimiliki bank bersumber dari dana nasabah, sehingga semakin tinggi proporsi IAH akan meningkatkan pengawasan dan berdampak pada tingkat pengungkapan bank syariah (Farook *et al.*, 2011). Adapun pengukuran pada variabel IAH dengan cara membandingkan dana pihak ketiga dibagi dengan modal disetor penuh pemegang saham.

Hasil dari perhitungan ini akan menghasilkan proporsi IAH (Mnif dan Tahari, 2020a), atau dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Proporsi IAH} = \frac{\text{Dana Pihak Ketiga}}{\text{Total Ekuitas}}$$

f. *Leverage*

*Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana bank atau perusahaan dibiayai oleh utang. Semakin tinggi rasio ini, mengakibatkan tingginya risiko tak tertagihnya utang menjadi lebih tinggi. Sehingga untuk menghindari risiko tersebut, kreditor akan melakukan pengawasan ketat terhadap aktivitas bank. Dampaknya bank akan lebih mengungkapkan banyak informasi (Yani dan Suputra, 2020). Untuk mengetahui tingkat *leverage* suatu bank dapat melalui cara sebagai berikut (El-Halaby *et al.*, 2018):

$$\text{Leverage} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$$

g. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank atau perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba dalam satu periode tertentu. Menurut teori *signaling* perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi. Adapun untuk mengetahui tingkat profitabilitas dapat diketahui melalui cara sebagai berikut (El-Halaby dan Hussainey, 2016):

$$\text{ROA} = \frac{\text{Earning After Tax}}{\text{Total Assets}}$$



#### h. Ukuran Perusahaan

Menurut teori agensi, perusahaan dengan ukuran yang lebih besar cenderung lebih diawasi oleh berbagai pihak, sehingga perusahaan dituntut untuk lebih banyak mengungkapkan informasi. Untuk mengetahui ukuran perusahaan dapat diketahui melalui total aset (El-Halaby dan Hussainey, 2016).

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Log Total Aset}$$

### 3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan untuk memberikan gambaran mengenai objek penelitian dan analisis deskriptif tiap variabel adalah statistik/ analisis deskriptif. Statistik/ analisis deskriptif berisi ringkasan statistik yang memuat di antaranya: nilai rata-rata, median, nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi. Lebih lanjut, untuk mengetahui keterkaitan antara tiap variabel independen terhadap variabel dependen menggunakan analisis data panel berupa regresi linear berganda (OLS) dengan alat bantu berupa program Eviews 10.

### 3.5 Estimasi Model Regresi dengan Model Panel

Menurut Widarjono (2009) dalam Prasanti *et al.* (2015), data panel adalah gabungan antara data *time series* (runtun waktu) dan data *cross section* (individual). Secara umum model regresi data panel dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha_{it} + X_{it}\beta + U_{it}$$

$i$  : 1,2,...,N, menunjukkan unit data *cross section*

$t$  : 1,2,...,T, menunjukkan uni data *time series*

$Y_{it}$  : nilai variabel dependen unit *cross section* ke- $i$  untuk periode waktu ke- $t$

$\beta$  :  $(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k)$  adalah vektor slope berukuran  $1 \times k$  dengan  $k$  banyaknya variabel independen

$X_{it}$  :  $(X_{1it}, X_{2it}, \dots, X_{kit})$  menunjukkan vector observasi pada variabel independen

$U_{it}$  : *error* regresi unit *cross section* ke- $i$  untuk periode waktu ke- $t$

Dalam melakukan estimasi model regresi data panel terdapat tiga pendekatan yang sering digunakan, yaitu pendekatan *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect* (Porter dan Gujarati, 2013).

### 3.5.1. Model *Common Effect* (CE)

Model *common effect* merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi model regresi data panel. Pendekatan ini mengabaikan heterogenitas antar unit *cross section* maupun *time series*. Dalam mengestimasi model *common effect* dapat dilakukan dengan metode *ordinary least square* (OLS). Secara umum model regresi data panel dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + X_{it}\beta + U_{it}$$

### 3.5.2. Model *Fixed Effect* (FE)

Model *fixed effect* merupakan model yang memperkenankan heterogenitas antar subjek dengan memberi setiap entitas nilai intersep tersendiri. Istilah *fixed effect* sendiri menunjukkan intersep yang berbeda-beda untuk tiap-tiap subjek, tetapi tiap intersep tiap *entity* tidak berubah seiring waktu.

$$Y_{it} = \alpha_i + X_{it}\beta + U_{it}$$

### 3.5.3. Model *Random Effect* (RE)

Model *random effect* (RE) mengasumsikan setiap unit *cross section* memiliki perbedaan intersep. Namun demikian, diasumsikan bahwa intersep  $\alpha_i$  adalah variabel acak dengan mean  $\alpha_0$ . Sehingga intersep dapat ditulis sebagai  $\alpha_i = \alpha_0 + \varepsilon_i$  dengan  $\varepsilon_i$  merupakan *error random* yang mempunyai mean nol dan varian  $\sigma^2_\varepsilon$ . Model *random effect* dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha_0 + X_{it}\beta + W_{it}$$

Dengan  $W_{it} = \varepsilon_i + U_{it}$ ,  $\varepsilon_i$  adalah komponen *error cross section*, dan  $U_{it}$  adalah *error* secara menyeluruh yang merupakan kombinasi *time series* dan *cross section*. Estimasi model *random effect* dilakukan dengan metode *Generalized Least Square* (GLS).

Penelitian mengenai analisis pengaruh kinerja keuangan dan tata kelola perusahaan terhadap tingkat kepatuhan syariah bank syariah di Indonesia diestimasi menggunakan model regresi. Regresi ini digunakan untuk meramalkan pengaruh antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen.

Model regresi dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{SSBREM}_{it} + \beta_2 \text{SSBCROSS}_{it} + \beta_3 \text{KOMIND}_{it} + \beta_4 \text{AUDIND}_{it} + \beta_5 \text{IAH}_{it} + \beta_6 \text{LEV}_{it} + \beta_7 \text{PROFIT}_{it} + \beta_8 \text{SIZE}_{it} + \text{eit}$$

Di mana:

$Y_{it}$  = Kepatuhan syariah pada bank  $i$  pada periode  $t$ .

$\beta_0$  = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6$  = Koefisien regresi

$\text{SSBREM}_{it}$  = Remunerasi DPS pada bank  $i$  pada periode  $t$

$\text{SSBCROSS}_{it}$  = Keanggotaan-silang DPS pada bank  $i$  pada periode  $t$

KOMINDit	= Komisaris independen pada bank $i$ pada periode $t$
AUDINDit	= Komite Audit Independen pada bank $i$ pada periode $t$
IAHit	= <i>Investment account holder</i> pada bank $i$ pada periode $t$
LEVit	= <i>Leverage</i> pada bank $i$ pada periode $t$
PROFit	= Profitabilitas pada bank $i$ pada periode $t$
SIZEit	= Ukuran perusahaan pada bank $i$ pada periode $t$
Eit	= Error

### 3.6 Pemilihan Model Regresi

Pemilihan model regresi ini bertujuan untuk memilih model terbaik pada regresi data panel. Dalam memilih model regresi yang paling tepat dengan tujuan penelitian ini, terdapat dua cara yang dapat ditempuh, yaitu Uji *Chow* dan Uji *Hausman*

#### 3.6.1. Uji *Chow* atau *Likelihood-test*

Dilakukan untuk membandingkan /memilih model mana yang terbaik antara CE dan FE. Untuk mengetahui model mana yang terpilih adalah dengan cara melihat nilai signifikan profitabilitas dari *cross-section chi-square*. Jika nilainya  $>0.05$  maka model yang terpilih adalah CE, jika  $<0.05$  maka model yang terpilih adalah FE

#### 3.6.2. Uji *Hausman*

Dilakukan untuk membandingkan/model mana yang terbaik antara FE dan RE. Untuk mengetahui model mana yang terpilih, adalah dengan melihat nilai probabilitas *cross-section random*. Jika nilainya  $>0.05$  dapat disimpulkan model RE lebih tepat dibandingkan dengan model FE.

### 3.7 Uji Asumsi Klasik

#### 3.7.1. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan pengujian data yang digunakan untuk mengetahui apakah model regresi memiliki distribusi normal atau tidak. Suatu model regresi dapat dikatakan baik, apabila memiliki distribusi normal. Cara untuk mengetahui data terdistribusi normal adalah dengan melihat nilai probabilitas pada hasil uji normalitas. Jika nilai probabilitas  $>0.05$  maka data terdistribusi normal. Sebaliknya, jika  $<0.05$  maka data tidak terdistribusi normal.

#### 3.7.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Model regresi dikatakan baik apabila suatu model tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk mengetahui, apakah suatu model mengalami multikolinearitas adalah dengan melihat matrik korelasi antar variabel bebas. Jika nilainya tidak lebih dari 0.9, maka dapat disimpulkan tidak terjadi mengalami multikolinearitas.

### 3.8 Pengujian Hipotesis

Uji statistik terdiri dari uji koefisien determinasi ( $R^2$ ), uji f statistik dan uji t statistik. Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai 1, semakin nilai  $R^2$  mendekati satu, berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen. Derajat signifikansi yang digunakan peneliti adalah 5%. Uji t diterima apabila nilai t hitung lebih kecil dari nilai signifikansi.

Uji f sendiri digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji f diterima apabila nilai profitabilitas f-statistik lebih kecil dari nilai signifikansi 1%, 5% atau 10% (peneliti menggunakan nilai signifikansi 5%).

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Statistik Deskriptif

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis pengaruh antara remunerasi DPS (SSBREM), keanggotaan-silang DPS (SSBCROSS), komisaris independen (KOMIND), komite audit independen (AUDIND), *investment account holders* (IAH), *leverage* (LEVERAGE), profitabilitas (PROFIT) dan ukuran perusahaan (SIZE) terhadap tingkat kepatuhan syariah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan populasi bank syariah yang berada di Indonesia selama periode 2015 – 2020. Selain itu, bank syariah yang diteliti adalah yang menerbitkan laporan tahunannya pada website masing-masing bank selama periode 2015 – 2020 dan telah diaudit. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan pada bab tiga, tersaring sepuluh bank syariah yang menjadi objek penelitian.

**Tabel 4.1 Daftar Bank Syariah Sampel**

No	Nama Bank
1	Bank Syariah Mandiri
2	Bank BRI Syariah
3	Bank BNI Syariah
4	Bank Muamalat Indonesia
5	Bank BCA Syariah
6	Bank Panin Dubai Syariah
7	Bank Mega Syariah
8	Bank Bukopin Syariah
9	Bank BTPN Syariah
10	Bank BJB Syariah

Berdasarkan data yang telah didapatkan oleh peneliti, selanjutnya dilakukan analisis deskriptif yang disajikan dalam tabel 4.2 sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Statistik Deskriptif**

	Y	SSBREM	SSBCROSS	KOMIND	AUDIND	IAH	LEVERAGE	PROFIT	SIZE
Mean	81.28	8.86	62.39	68.75	83.06	5.78	18.29	0.68	13.21
Median	83.33	8.85	50.00	66.67	85.71	5.21	16.35	0.46	12.96
Maximum	88.33	9.39	100.00	100.00	100.00	28.09	82.46	8.54	14.10
Minimum	70.00	7.80	0.00	0.00	33.33	0.64	5.24	-11.23	12.64
Std. Dev.	4.60	0.26	34.12	18.68	19.95	4.19	11.04	2.73	0.44
Obs.	60	60	60	60	60	60	60	60	60

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa jumlah data dari penelitian ini sebanyak 60 data observasi. Hasil di atas menunjukkan nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi untuk setiap variabel. Dari hasil analisis di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel tingkat kepatuhan syariah (Y) yang diukur dengan membagi seluruh item yang diungkapkan pada satu bank dibagi dengan jumlah seluruh standar item yang diungkapkan. Dari tabel 4.2 dapat diketahui bahwa rata-rata skor pengungkapan kepatuhan bank syariah di Indonesia yang diobservasi selama 2015 – 2020 menunjukkan skor kepatuhan sebesar 81.28%. Adapun untuk tingkat kepatuhan tertinggi sebesar 88.33% yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri pada tahun 2016. Sedangkan untuk tingkat kepatuhan terendah sebesar 70% yang diperoleh BTPN Syariah tahun 2015. Hal ini dikarenakan BTPN Syariah baru menjadi Bank Umum Syariah (BUS) sejak 2014. Menurut El-Halaby dan Hussainey (2016), semakin lama usia bank, maka bank tersebut akan lebih banyak mengungkapkan informasi. Selain itu selama periode 2015 – 2020, bank BTPN Syariah belum mengelola dana zakat, sehingga tidak mengungkapkan pengelolaan dana zakat. Adapun standar deviasinya



sebesar 4.6 yang menunjukkan bahwa variabel tingkat kepatuhan syariah bersifat homogen atau dapat diartikan, skor rata-rata kepatuhan syariah ini dapat merepresentasikan tingkat kepatuhan seluruh sampel.

2. Variabel remunerasi DPS (SSBREM) yang diukur dengan log remunerasi DPS yang diperoleh dari laporan tahunan bank menunjukkan nilai rata-rata sebesar 8.86. Adapun nilai maksimum dalam variabel ini 9.39 atau Rp. 2.4 miliar yang diberikan Bank Syariah Mandiri kepada DPS di tahun 2019. Sedangkan untuk nilai minimumnya sebesar 7.8 yang diberikan Bank Syariah Bukopin kepada DPS di tahun 2019. Adapun nilai standar deviasi sebesar 0.26, hal ini berarti bahwa variabel remunerasi DPS bersifat homogen atau menunjukkan bahwa rata-rata jumlah remunerasi yang diberikan bank kepada DPS dalam rentang yang sama.
3. Variabel keanggotaan-silang DPS (SSBCROSS) yang diukur dengan persentase anggota DPS yang duduk pada lebih satu bank syariah menunjukkan rata-rata sebesar 62.39%. Hal ini berarti bahwa sebagian besar anggota DPS tidak hanya menjadi anggota DPS pada satu bank saja melainkan juga menjadi anggota DPS pada bank syariah lain. Adapun nilai maksimum keanggotaan-silang DPS sebesar 100% yang dimiliki oleh Bank BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Muamalat Indonesia, BCA Syariah, Bukopin Syariah, dan BTPN Syariah. Sedangkan nilai minimumnya sebesar 0%. Standar deviasi variabel ini sebesar 34.11, yang menunjukkan bahwa variabel ini bersifat homogen, yang berarti bahwa rata-rata skor keanggotaan-silang DPS dapat merepresentasikan persentase keanggotaan-silang DPS pada masing-masing bank syariah.

4. Variabel komisaris independen (KOMIND) yang diproksikan dengan persentase jumlah anggota komisaris independen dibagi dengan seluruh anggota komisaris, menunjukkan rata-rata sebesar 68.75%. Nilai rata-rata ini menandakan bahwa proporsi anggota komisaris independen dalam bank syariah cukup tinggi. Skor rata-rata ini tentunya sangat baik, mengingat persentase komisaris independen yang dipersyaratkan regulasi melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 sebesar 50%. Hal ini guna meningkatkan efektivitas dewan komisaris dalam melaksanakan pengawasan. Selanjutnya berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa nilai maksimum komisaris independen sebesar 100%, yang dimiliki oleh BSM tahun 2019, BNI Syariah tahun 2016 dan 2017, Bank Panin Dubai Syariah 2017, dan Bank Mega Syariah 2015 – 2020. Lebih lanjut, diketahui bahwa nilai minimum persentase komisaris independen sebesar 0% yang dimiliki oleh Bank Panin Dubai Syariah tahun 2016, hal ini dikarenakan kedua komisaris independen mengundurkan diri. Standar deviasi dalam penelitian ini sebesar 18.68 menunjukkan bahwa variabel ini bersifat homogen atau berarti, nilai rata-rata komisaris independen dapat merepresentasikan persentase komisaris independen pada bank sampel.
5. Variabel komite audit independen (AUDIND) yang diproksikan dengan persentase jumlah anggota komite audit independen dibagi dengan jumlah seluruh komite audit menunjukkan skor rata-rata sebesar 83.06%. Hasil ini tentunya sangat baik, mengingat berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance*, mempersyaratkan minimal komisaris independen ditambah pihak independen memiliki 51% proporsi dalam komite audit. Proporsi atau persentase minimal ini,

ditujukan untuk meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan, utamanya dalam hal informasi keuangan dan sistem pengendalian internal. Lebih lanjut, berdasarkan tabel 4.2 diketahui nilai maksimum komite audit independen sebesar 100%, yang dimiliki oleh BSM tahun 2019, BRI Syariah 2017 – 2020, BNI Syariah 2016 – 2018, Bank Muamalat Indonesia 2017 – 2020, BCA Syariah 2015 – 2018, Bank Panin Dubai Syariah 2017, dan Bank Mega Syariah 2015 – 2020. Selanjutnya, berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa nilai minimum sebesar 33.33%, yang dimiliki oleh bank BUKOPIN Syariah tahun 2015 – 2017; dan Bank Panin Dubai Syariah pada tahun 2020. Standar deviasi variabel ini sebesar 19.95 yang menunjukkan bahwa data bersifat homogen atau berarti nilai rata-rata komite audit independen dapat merepresentasikan persentase komite audit independen dalam bank sampel.

6. Variabel *investment account holders* (IAH) yang diukur dengan jumlah dana pihak ketiga dibagi jumlah ekuitas menunjukkan nilai rata-rata sebesar 5.78, atau yang berarti bahwa nilai akun IAH pada bank syariah lebih besar daripada jumlah ekuitas yang dimiliki. Hal ini tentu saja menunjukkan ketergantungan bank terhadap para pemegang akun IAH. Selanjutnya, berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa nilai maksimum IAH sebesar 28.09 yang dimiliki Bank Panin Dubai Syariah pada tahun 2017. Lebih lanjut, dari tabel 4.2 diketahui bahwa nilai minimum IAH sebesar 0.64 yang dimiliki Bank Mega Syariah tahun 2017. Standar deviasi sebesar 4.19 yang menunjukkan bahwa data bersifat homogen, atau berarti nilai rata-rata IAH dapat merepresentasikan IAH pada bank sampel.
7. Variabel *leverage* (LEVERAGE) yang diukur dengan total utang dibagi dengan total aset, menunjukkan nilai rata-rata sebesar 18.29% atau berarti, dari 100% jumlah aset

bank syariah, hanya 18,29% yang bersumber dari utang, sedangkan 81,71% bersumber dari dana pihak ketiga dan ekuitas. Hasil ini juga menunjukkan besarnya kemampuan bank untuk melunasi utang-utang kepada kreditur. Berdasarkan tabel 4.2 diketahui nilai maksimum *leverage* sebesar 82.46% yang dimiliki oleh Bank Mega Syariah pada tahun 2020. Tingginya utang ini disebabkan adanya akun efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali sebesar 4,5 triliun dan menyebabkan utang bank mega syariah naik sebesar 558.63% dibandingkan tahun 2019. Selanjutnya, berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa nilai minimum *leverage* sebesar 5.24% yang dimiliki bank Panin Dubai Syariah pada tahun 2019. Hasil ini tentunya menggambarkan kecilnya kebutuhan utang pada bank Panin Dubai Syariah untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Standar deviasi variabel *leverage* sebesar 11.04 yang menunjukkan data bersifat homogen atau berarti nilai rata-rata variabel *leverage* dapat merepresentasikan rasio *leverage* pada bank sampel.

8. Variabel profitabilitas (PROFIT) yang diukur dengan laba setelah pajak dibagi dengan total aset memiliki nilai rata-rata sebesar 0.68% yang berarti bahwa rata-rata bank sampel memiliki tingkat keuntungan sebesar 0.68% atas total aset yang dimiliki oleh bank sampel. Hasil ini juga dapat menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset suatu perusahaan, sehingga rumus ini dapat dijadikan pembandingan efisiensi antar perusahaan. Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa nilai maksimum profitabilitas sebesar 8.54% yang diperoleh BTPN Syariah tahun 2019. Nilai maksimum ini tentunya menggambarkan bahwa pengelolaan total aset bank BTPN lebih efisien jika dibandingkan rata-rata bank sampel. Selanjutnya, berdasar tabel 4.2 diketahui bahwa nilai minimum profitabilitas sebesar -11.23% yang diterima Bank Panin Dubai

Syariah tahun 2017. Hasil ini dikarenakan di tahun 2017, Bank Panin Dubai Syariah memiliki beban kerugian nilai yang sangat tinggi, di mana tahun 2016 sebesar Rp. 58.624.508.000 berubah menjadi Rp 1.000.205.338.000. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya NPF (rasio pembiayaan bermasalah) pada pembiayaan mudharabah tahun 2017 sebesar 19.03 dari 1.39 di tahun 2016, dan NPF pembiayaan musyarakah tahun 2017 sebesar 13.40 dari 2.14 pada tahun 2016. Standar deviasi variabel profitabilitas sebesar 2.73 atau data bersifat heterogen, artinya nilai rata-rata variabel profitabilitas tidak merepresentasikan rasio profitabilitas bank sampel.

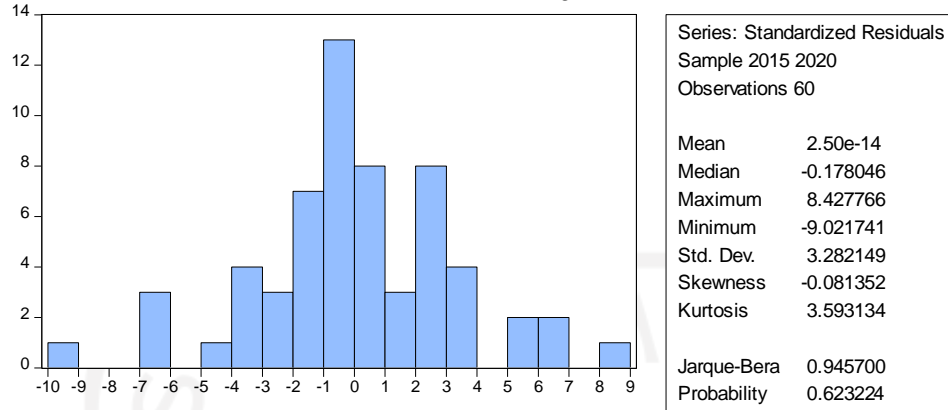
9. Variabel ukuran perusahaan (SIZE) yang diproksikan dengan *log total assets* menunjukkan nilai rata-rata sebesar 13.21 dan memiliki standar deviasi sebesar 0.45, yang menunjukkan bahwa data variabel ukuran perusahaan bersifat homogen dan berarti nilai rata-rata ini dapat merepresentasikan ukuran perusahaan pada bank sampel. Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa nilai maksimum variabel ukuran perusahaan sebesar 14.1 yang dimiliki Bank Syariah Mandiri tahun 2020 atau sebesar Rp 126.907.940.000.000. Selanjutnya, nilai minimum variabel sebesar 12.64 atau Rp 4.439.580.046.527 yang dimiliki bank BCA Syariah tahun 2015.

## **4.2. Hasil Uji Asumsi Klasik**

### **4.2.1. Analisis Uji Normalitas**

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel dependen dan independen dalam penelitian ini memiliki distribusi normal atau tidak. Suatu model regresi dikatakan baik apabila memiliki distribusi normal. Adapun uji normalitas yang telah dilakukan menggunakan aplikasi e-views menunjukkan bahwa data terdistribusi normal.

**Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas**



Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa nilai *probability* sebesar  $0.623224 > 0.05$  yang menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi syarat normalitas.

#### 4.2.2. Analisis Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah suatu model regresi terjadi korelasi antar variabel independen (bebas). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antar variabel bebas atau tidak, dapat diketahui dengan melihat nilai pada matrik korelasi. Jika nilainya  $>0.90$  maka dapat disimpulkan adanya masalah korelasi dalam model regresi tersebut.

**Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas**

	SSBREM	SSBCROSS	KOMIND	AUDIND	IAH	LEVERAGE	PROFIT	SIZE
SSBREM	1	0.142454	0.153468	0.472602	0.1640902	0.037798	0.058089	0.636579
SSBCROSS	0.142454285	1	-0.10544	0.175127	0.1003839	0.03901	0.188545	0.332391
KOMIND	0.153467773	-0.10544	1	0.346412	0.0804729	0.129241	-0.17606	-0.00325
AUDIND	0.472602085	0.175127	0.346412	1	-0.13476	0.180721	0.304897	0.214118
IAH	0.164090156	0.100384	0.080473	-0.13476	1	-0.06356	-0.52714	0.47911
LEVERAGE	0.037797761	0.03901	0.129241	0.180721	-0.063556	1	0.155149	0.177241
PROFIT	0.058089492	0.188545	-0.17606	0.304897	-0.527142	0.155149	1	0.027966
SIZE	0.636578788	0.332391	-0.00325	0.214118	0.4791099	0.177241	0.027966	1

Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa nilai dari korelasi antar variabel independen, tidak ada yang melebihi 0.90. Hal ini menunjukkan bahwa dalam model regresi ini tidak mengandung masalah korelasi.

### 4.3. Pemilihan Model Regresi

Dalam regresi data panel terdapat tiga model regresi yang dapat dipilih yaitu *common effect*, *fixed effect* dan *random effect*. Untuk memilih model regresi yang paling tepat dapat dilakukan dengan melakukan uji *chow* dan uji *hausman*.

#### 4.3.1 Uji Chow

Uji *chow* bertujuan untuk memilih model antara *common effect* atau *fixed effect*. Untuk mengetahui model mana yang terpilih adalah dengan cara membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas *cross-section chi-square*. Apabila nilainya melebihi  $>0,05$  (5%) maka model yang terpilih adalah *common effect*, jika  $<0,05$  (5%) maka model yang terpilih adalah *fixed effect*

**Tabel 4.5 Hasil Uji Chow**

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	8.42854	(9,42)	0.000000
Cross-section Chi-square	61.9081	9	0.000000

Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa nilai probabilitas *cross-section chi-square* adalah 0.00, atau dengan kata lain, memiliki nilai probabilitas yang lebih kecil daripada 0.05 (5%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang paling tepat pada penelitian ini adalah *fixed effect*.

#### 4.3.2 Uji Hausman

Uji *hausman* dilakukan untuk memilih model mana yang lebih baik antara *fixed effect* atau *random effect*. Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan antara

nilai probabilitas *cross-section random* dengan nilai signifikansi 0,05 (5%). Apabila nilai probabilitas *cross-section random* lebih kecil dari 0,05 maka model yang terpilih adalah *fixed effect*, sebaliknya, jika nilai probabilitas *cross-section random* lebih besar dari 0,05 maka model yang terpilih adalah *random effect*.

**Tabel 4.6 Hasil Uji Hausman**

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	18.39104	8	0.0185

Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa nilai probabilitas *cross-section random* adalah 0.0185 atau dengan kata lain, memiliki nilai probabilitas yang lebih kecil daripada nilai signifikansi 0.05 (5%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang paling tepat dalam penelitian ini adalah *fixed-effect*.

#### 4.4. Pengujian Hipotesis

##### 4.4.1. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai satu, semakin nilai  $R^2$  mendekati satu, berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen.

**Tabel 4.7 Hasil R-squared**

R-squared	0.81828
Adjusted R-squared	0.744727

Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0.7447, hal ini dapat diartikan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini di antaranya: remunerasi DPS, keanggotaan-silang DPS, komisararis independen, komite



audit independen, *investment account holders*, *leverage*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama mampu mempengaruhi tingkat kepatuhan syariah bank syariah sebesar 0.7447 atau 74,47%. Sedangkan untuk sisanya 25.53% dapat dijelaskan oleh variabel-variabel diluar penelitian ini.

#### 4.4.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji f bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Hal ini dapat diketahui dengan cara membandingkan antara nilai probabilitas *f-statistic* dengan nilai signifikansi 0.05 atau 5%. Apabila nilai probabilitas menunjukkan hasil yang kurang dari nilai signifikansi maka dapat diartikan bahwa secara simultan variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

**Tabel 4.7 Hasil Uji F**

F-statistic	11.12501
Prob(F-statistic)	0.00000

Berdasarkan tabel 4.7 diketahui bahwa nilai probabilitas *f-statistic* sebesar 0.0000, atau lebih kecil dari nilai signifikansi 0.05 (5%). Hal ini dapat diartikan bahwa semua variabel independen dalam penelitian ini berupa remunerasi DPS, keanggotaan-silang DPS, komisaris independen, komite audit independen, *investment account holders*, *leverage*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kepatuhan syariah bank syariah.

#### 4.4.3. Model Regresi

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilaksanakan maka diperoleh persamaan regresi. Adapun hasil dari regresi dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 4.8 Hasil Regresi Data Panel Statis**

Variable	Coefficient
C	-10.79858
SSBREM	-2.466495
SSBCROSS	0.041688
KOMIND	0.056841
AUDIND	-0.079559
IAH	-0.122117
LEVERAGE	0.060275
PROFIT	0.273338
SIZE	8.59095

Dari hasil regresi pada tabel 4.9 dapat disederhanakan menjadi persamaan model regresi yang berfungsi untuk menganalisis variabel dependen. Pada penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah tingkat kepatuhan syariah (Y). Adapun variabel independen dalam penelitian ini adalah remunerasi DPS, keanggotaan silang DPS, komisaris independen, komite audit independen, *investment account holders* (IAH), *leverage*, profitabilitas dan ukuran perusahaan. Adapun persamaan model regresi *fixed effect* dinyatakan sebagai berikut:

$$Y = -10.798 - 2.466 \text{ SSBREM} + 0.041 \text{ SSBCROSS} + 0.057 \text{ KOMIND} - 0.079 \text{ AUDIND} - 0.122 \text{ IAH} + 0.060 \text{ LEVERAGE} + 0.273 \text{ PROFIT} + 8.590 \text{ SIZE} + e$$

1. Konstanta ( $\beta_1$ )

Nilai Konstanta ( $\beta_1$ ) dari tingkat kepatuhan sebesar -10.798. Hal ini dapat diartikan jika nilai dari remunerasi DPS, keanggotaan silang DPS, komisaris independen, komite audit independen, *investment account holders* (IAH), *leverage*, profitabilitas dan ukuran perusahaan adalah nol, maka nilai tingkat kepatuhan syariah sebesar -10.798.

## 2. Remunerasi DPS

Variabel remunerasi DPS (SSBREM) yang diproksikan dengan log remunerasi memiliki nilai koefisien sebesar -2.466 dengan tanda negatif yang berarti apabila variabel remunerasi DPS meningkat sebesar satu satuan, maka tingkat kepatuhan syariah akan turun sebesar 2.466 dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan.

## 3. Keanggotaan-silang DPS

Variabel keanggotaan silang DPS (SSBCROSS) yang diproksikan dengan proporsi anggota DPS yang juga menjadi anggota DPS pada bank lain, memiliki nilai koefisien sebesar 0.041 dengan tanda positif yang berarti apabila variabel keanggotaan-silang DPS meningkat sebesar satu satuan, maka tingkat kepatuhan syariah akan naik sebesar 0.041 dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan.

## 4. Komisaris Independen

Variabel komisaris independen (KOMIND) yang diproksikan dengan proporsi anggota komisaris independen, memiliki nilai koefisien sebesar 0.057 dengan tanda positif yang berarti apabila variabel komisaris independen meningkat sebesar satu satuan, maka tingkat kepatuhan syariah naik sebesar 0.057 dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan.

## 5. Komite Audit Independen

Variabel komite audit independen (AUDIND) yang diproksikan dengan proporsi keberadaan anggota audit internal independen, memiliki nilai koefisien sebesar -0.079 dengan tanda negatif yang berarti apabila variabel komite audit independen meningkat

sebesar satu satuan, maka tingkat kepatuhan syariah akan berkurang sebesar 0.079 dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan.

#### 6. *Investment Account Holders (IAH)*

Variabel IAH yang diukur dengan membandingkan jumlah dana pihak ketiga dibagi dengan jumlah ekuitas, memiliki nilai koefisien sebesar -0.122 dengan tanda negatif yang berarti apabila variabel IAH meningkat sebesar satu satuan, maka tingkat kepatuhan syariah akan berkurang sebesar 0.122 dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan.

#### 7. *Leverage*

Variabel *leverage* yang diukur dengan membagi total utang dengan total aset memiliki nilai koefisien sebesar 0.060 dengan tanda positif yang berarti apabila variabel *leverage* meningkat sebesar satu satuan maka tingkat kepatuhan syariah akan naik sebesar 0.060 dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan.

#### 8. Profitabilitas

Variabel profitabilitas (PROFIT) yang diukur dengan membagi laba setelah pajak dengan total aset, memiliki nilai koefisien sebesar 0.273 dengan tanda positif yang berarti apabila variabel profitabilitas meningkat satu satuan maka tingkat kepatuhan akan naik sebesar 0.273 dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan.

#### 9. Ukuran Perusahaan

Variabel ukuran perusahaan (SIZE) yang diprosikan dengan *log total asset*, memiliki nilai koefisien sebesar 8.591 dengan tanda positif yang berarti apabila variabel ukuran perusahaan meningkat satu satuan maka tingkat kepatuhan akan naik sebesar 8.591 dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan.

#### 4.4.4. Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji Statistik T)

Uji statistik t bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial atau dengan menganggap variabel lain konstan. Untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial atau uji t dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai probabilitas dengan nilai signifikansi 0.05 (5%). Apabila nilai probabilitas lebih kecil dari nilai signifikansi, maka dapat disimpulkan variabel tersebut berpengaruh. Selain itu dalam uji t ini, peneliti akan membandingkan hasil regresi data panel statis dan data panel dinamis.

**Tabel 4.9 Hasil Uji T Model *Fixed Effect***

Variable	Data Panel Statis	
	t-Statistic	Prob.
C	-0.212638	0.8326
SSBREM	-0.771937	0.4445
SSBCROSS	2.389388	0.0214
KOMIND	2.022502	0.0495
AUDIND	-2.246602	0.03
IAH	-0.95255	0.3463
LEVERAGE	1.671415	0.1021
PROFIT	1.159617	0.2528
SIZE	2.014088	0.0504

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa:

##### 1. Variabel Remunerasi DPS (SSBREM)

Berdasarkan tabel 4.9 diketahui bahwa nilai probabilitas variabel remunerasi DPS sebesar 0.4445 yang menunjukkan nilai probabilitas lebih besar daripada nilai signifikansi 5% atau 0.05. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel remunerasi DPS tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan syariah.

Hasil penelitian ini tidak mendukung temuan Mnif dan Tahari (2020b), dan juga tidak mendukung teori agensi, yang menyatakan bahwa pemberian remunerasi yang tinggi dapat memotivasi dewan untuk bekerja lebih keras dan mengurangi konflik kepentingan antara dewan dengan pemilik (Razali *et al.*, 2018; Aslam *et al.*, 2019). Hal ini dikarenakan adanya perbedaan antara dewan pengawas syariah dan dewan komisaris. Di mana dewan pengawas syariah adalah pihak independen yang merupakan perwakilan dari dewan syariah nasional (DSN-MUI) yang memiliki tugas utama untuk memastikan bank syariah telah mengikuti prinsip-prinsip syariah. Sedangkan dewan komisaris bertugas untuk memaksimalkan kepentingan/keuntungan pemegang saham. Berdasarkan argumen ini, tentunya menjadi wajar jika remunerasi DPS tidak menjadi faktor penentu tingkat pengungkapan kepatuhan syariah. Lebih lanjut, AAOIFI GS 5 menyebutkan bahwa DPS memiliki tanggung jawab yang besar kepada publik, yaitu memastikan bank syariah telah memenuhi prinsip-prinsip syariah. Oleh karenanya, AAOIFI GS 5 menuntut agar DPS dapat memberikan layanan independen tanpa dipengaruhi oleh tekanan kepentingan termasuk juga tingkat remunerasi.

## 2. Keanggotaan-Silang DPS (SSBCROSS)

Berdasarkan tabel 4.9 diketahui bahwa variabel keanggotaan-silang DPS memiliki nilai probabilitas 0.0214. Nilai probabilitas ini lebih kecil dari taraf signifikansi 0.05 atau 5%. Hasil ini dapat diartikan bahwa keanggotaan-silang DPS berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan syariah.

Hasil signifikan ini dapat dijelaskan bahwa, anggota DPS yang melayani lebih dari satu bank syariah akan lebih banyak menghadapi berbagai perdebatan dan diskusi mengenai praktik hukum syariah di industri syariah. Selanjutnya, keanggotaan-silang

DPS juga memungkinkan mereka untuk melakukan perbandingan praktik terbaik di antara bank syariah. Bahkan dengan adanya keanggotaan-silang ini, DPS dapat juga membandingkan dan memahami praktik pelaporan antar bank. Dari semua itu, nantinya akan mendukung pengetahuan DPS tentang penerapan aturan syariah dan kebijakan pengungkapan, sehingga akan meningkatkan efektivitas DPS, dan mengarah pada peningkatan kinerja dan transparansi antar bank syariah (Farook *et al.*, 2011; Abdullah *et al.*, 2013; Srairi, 2018).

Hanifa dan Cooke (2002) juga menambahkan, bahwa keputusan yang diambil DPS pada satu bank syariah akan berpengaruh pada bank syariah lain dan mengarah pada pengungkapan yang lebih transparan. Hubungan ini, juga dapat dijelaskan melalui *resource dependence theory*, yang menyatakan bahwa adanya keanggotaan-silang DPS dapat menjadi penghubung bank syariah dengan lingkungan eksternal dan memungkinkannya untuk memantau kebijakan-kebijakan bank syariah lain. Sehingga, keanggotaan-silang dapat menjadikan DPS sebagai sumber informasi untuk pengambilan kebijakan pada bank tertentu (Nomran, Haron dan Hassan, 2018).

Hasil penelitian ini mendukung studi empiris terdahulu seperti Farook *et al.* (2011); Abdullah *et al.* (2013); El-Halaby dan Hussainey (2016); Srairi, 2018; Nomran, Haron dan Hassan (2018) dan Mnif dan Tahari (2020b). Bahwasannya keanggotaan-silang DPS dapat meningkatkan tingkat pengungkapan atau kepatuhan syariah.

### 3. Komisaris Independen (KOMIND)

Berdasarkan tabel 4.9 diketahui bahwa variabel komisaris independen memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0495. Nilai probabilitas ini lebih kecil dari taraf signifikansi 5% atau 0.05, yang berarti variabel komisaris independen berpengaruh terhadap tingkat

kepatuhan syariah. Hasil ini dapat dijelaskan, bahwa tingginya proporsi komisaris independen dalam komposisi dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap peningkatan efektivitas pengawasan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, serta dapat memberikan pertimbangan atau nasihat yang lebih baik untuk direksi. Hal ini seperti yang telah dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum syariah. Hasil signifikan ini juga dapat dilihat dari nilai rata-rata proporsi komisaris independen yang besar, yaitu 68.75%, hasil ini menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen pada bank sampel lebih tinggi dari proporsi yang disyaratkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013, yaitu 50%.

Argumen tentang efektivitas fungsi pengawasan dewan komisaris ditentukan oleh tingginya proporsi komisaris independen disampaikan oleh Jensen dan Meckling (1976), yang menyatakan bahwa keberadaan dewan komisaris independen dapat meningkatkan fungsi pengawasan dan menekan oportunistik manajer. Hal ini didukung oleh Weisbach (1988) yang menyatakan bahwa komisaris independen dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan pemantauan terhadap tindakan manajemen. Hal ini karena komisaris independen tidak terintimidasi oleh CEO. Meskipun demikian berdasarkan PBI Nomor 11/33/2009, dewan komisaris tidak boleh terlibat dalam pengambilan keputusan, akan tetapi menurut Pearce and Zahra (1992) keberadaan komisaris independen dalam hubungannya memberikan nasihat, dapat memberikan pengaruh positif atas pertimbangan dan keputusan direktur.

Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan, tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan saja, melainkan dapat memberikan gambaran tambahan dalam



pelaksanaan operasional perusahaan (Tricker, 1984). Hal ini dikarenakan komisaris independen memiliki kontak lingkungan eksternal, sehingga dapat membawa informasi ke dalam perusahaan. Dari semua argumen di atas, efektivitas komisaris independen akan mengarahkan perusahaan ke dalam pengungkapan yang lebih baik.

Hasil signifikansi ini sekaligus mendukung penelitian terdahulu tentang keberadaan komisaris independen yang dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan atau kepatuhan terhadap standar yang berlaku bagi bank syariah (Khan *et al.*, 2013; Das *et al.*, 2015; Juhmani, 2017; Garas, 2018).

#### 4. Komite Audit Independen (AUDIND)

Berdasarkan tabel 4.9 diketahui bahwa variabel komite audit independen memiliki nilai probabilitas sebesar 0.03. Nilai probabilitas ini lebih kecil dari taraf signifikansi 5% atau 0.05, yang berarti variabel komite audit independen berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan syariah.

Hasil ini dapat dijelaskan bahwa proporsi komisaris independen dan pihak independen dalam komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan atau kepatuhan syariah. Hasil ini menggambarkan efektivitas pelaksanaan fungsi komite audit dalam internal bank syariah. Di mana berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum syariah, dewan komisaris wajib membentuk komite audit untuk membantunya melaksanakan fungsi pengawasan. Di mana tugas spesifik komite audit adalah melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Selain

itu, dalam pembentukan komite audit, bank diwajibkan untuk memasukkan komisaris independen dan pihak independen ke dalam komite audit.

Hasil signifikansi ini juga dapat dilihat dari proporsi komisaris independen dan pihak independen dalam komite audit, di mana rata-rata bank syariah memiliki komisaris independen dan pihak independen yang besar, yaitu 83.06%. Rata-rata ini bahkan lebih tinggi dari proporsi yang disyaratkan dalam PBI Nomor 11/33/PBI/2009 yaitu 51%. Keberadaan komisaris independen dan pihak independen ini dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi komite audit.

Argumen tentang pentingnya keberadaan komisaris independen dan pihak independen dalam komite audit, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan oleh komite audit disampaikan oleh Klein (2002). Di mana Klein (2002) berpendapat semakin besar pihak independen di dalam komite audit, akan mengarah pada pengawasan yang lebih baik. Hal ini tercipta karena proporsi independen dalam komite audit yang besar lebih mampu menahan tekanan dari manajemen dan mampu mempertahankan objektivitasnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Fama and Jensen (1983) yang menyatakan, besarnya pihak independen dalam komite audit dapat mempertahankan objektivitas pemantauan, dan dapat mengurangi oportunistik manajer dalam pemilihan kebijakan akuntansi yang merugikan prinsipal. Khan, Muttakin, and Siddiqui (2013) menyampaikan, komite audit memiliki peranan untuk menyetujui pilihan kebijakan akuntansi, dan oleh karena itu, proporsi independen yang besar dalam komite audit dapat mempengaruhi terhadap pengungkapan keuangan yang lebih baik. Abdullah *et al.* (2015) menambahkan, anggota independen komite audit lebih responsif terhadap

pemangku kepentingan, oleh karena itu mereka lebih mungkin untuk menegakkan kepatuhan terhadap persyaratan pengungkapan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya, yang menemukan bahwa komite audit independen berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan syariah (Al-Akra *et al.*, 2010; Sellami dan Fendri 2017; Mnif dan Tahari, 2020a).

##### 5. *Investment Account Holders*

Berdasarkan tabel 4.9 diketahui bahwa nilai probabilitas *investment account holders* (IAH) sebesar 0.346. Nilai probabilitas ini lebih besar dari taraf signifikansi 5% atau 0.05, yang berarti variabel *investment account holders* (IAH) tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan syariah. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Abdullah *et al.* (2015), bahwa besarnya proporsi pemegang akun IAH tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan syariah. Hal ini dikarenakan, pemegang akun IAH tidak memiliki kontrol langsung atau hak suara terhadap perilaku manajer dalam pengambilan kebijakan selayaknya hak suara yang dimiliki investor. Meskipun demikian, Pemegang akun IAH secara tidak langsung dapat menekan pihak manajerial untuk mengungkapkan informasi lebih banyak. Hal ini dikarenakan, bila pemegang akun IAH merasa tidak puas terhadap apa yang diberikan bank, mereka dapat pergi dan mengambil dananya dengan mudah (Archer *et al.*, 1998).

Tidak berpengaruhnya proporsi pemegang saham akun IAH terhadap tingkat kepatuhan juga disampaikan oleh Al-Sadah (2007). Al-Sadah (2007) menjelaskan bahwa sebagian besar pemegang akun IAH bersifat pasif dalam berurusan bank syariah. Mereka tidak menggunakan laporan perusahaan untuk mengevaluasi kinerja bank. Bahkan, para pemegang akun IAH kurang mengetahui tentang pengetahuan dasar kontrak dan kegiatan

transaksi dengan bank syariah. Oleh karena itu, para pemegang akun IAH tidak aktif dalam mencari informasi yang berkaitan dengan mereka.

## 6. *Leverage*

Berdasarkan tabel 4.9 diketahui bahwa nilai probabilitas variabel *leverage* sebesar 0,102 dan lebih besar dari taraf signifikansi 5% atau 0.05, hal ini berarti, variabel *leverage* tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan atau tingkat kepatuhan syariah. Hasil ini diduga karena rata-rata sampel bank syariah memiliki rasio *leverage* yang cukup rendah, yaitu 18.29%. Nilai rata-rata ini dapat diinterpretasikan, bahwa dari 100% modal yang dimiliki bank syariah, hanya 18.29% bersumber dari utang. Sehingga terlihat jelas kecilnya proporsi utang dalam struktur modal bank syariah.

Rendahnya proporsi hutang inilah yang menyebabkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan. Hal ini sejalan dengan teori agensi, yang menyatakan pengungkapan yang lebih agresif, diberikan oleh perusahaan dengan rasio utang yang tinggi, dengan tujuan menurunkan biaya agensi yang timbul dari tingginya biaya pemantauan (Jensen dan Meckling, 1976). Xiao *et al.* (2004) juga menjelaskan bahwa hanya *leverage* yang tinggi yang dapat menyebabkan manajer untuk mengungkapkan lebih banyak informasi secara sukarela. Sedangkan, bagi perusahaan dengan rasio *leverage* yang rendah akan lebih mengorientasikan pengungkapannya kepada pemegang saham daripada kepada publik (Omar dan Simon, 2011).

Hasil tidak signifikan variabel *leverage* terhadap tingkat kepatuhan syariah, sejalan dengan penelitian Alrawahi dan Sarea (2016); Juhmani (2017); Garas dan ElMassah (2018) dan Mnif dan Tahari (2020a).

## 7. Profitabilitas (PROFIT)

Berdasarkan tabel 4.9 diketahui bahwa variabel profitabilitas memiliki nilai probabilitas sebesar 0.253, dan menunjukkan nilai probabilitas yang lebih besar dari taraf signifikansi 5% atau 0.05, yang berarti variabel probabilitas tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan syariah. Hasil tidak signifikan variabel profitabilitas terhadap tingkat pengungkapan atau tingkat kepatuhan syariah, dikarenakan rendahnya rata-rata ROA pada sampel bank syariah, yaitu sebesar 0.68%. Hasil ini mendukung teori sinyal, yang menyatakan bahwa, perusahaan dengan profitabilitas tinggi “*good news*” cenderung mengungkapkan informasi lebih banyak, dibandingkan perusahaan dengan profitabilitas rendah “*bad news*” (Inchausti, 1997). Perusahaan dengan profitabilitas rendah akan mengungkapkan lebih sedikit informasi, hal ini ditujukan untuk menyembunyikan “*bad news*”, baik berupa menyembunyikan kerugian atau penurunan keuntungan (Chavent *et al.*, 2006). Dimana, penurunan profitabilitas ini dapat berdampak buruk pada penurunan nilai perusahaan. Lebih lanjut, Fala (2007) juga menyampaikan bahwa, manajer dengan profitabilitas rendah, cenderung menahan pengungkapan lebih banyak, dengan harapan dapat memaksimalkan kompensasi manajer di tahun yang akan datang.

Hasil tidak signifikan profitabilitas terhadap tingkat pengungkapan atau tingkat kepatuhan syariah dalam penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya, diantaranya El-Halaby dan Hussainey (2016); Alrawahi dan Sarea (2016); Mnif dan Tahari (2020a) dan Mnif dan Tahari, 2020b).

## 8. Ukuran Perusahaan (SIZE)

Berdasarkan tabel 4.9 diketahui bahwa nilai probabilitas ukuran perusahaan sebesar 0.0504. Nilai probabilitas ini lebih besar dari taraf signifikansi 5% atau 0.05, yang berarti variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan syariah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya seperti Glaum *et al*, (2013); Sellami dan Tahari (2017); Azhar and Hamdan (2017) yang menemukan tidak ada hubungan antara ukuran perusahaan dengan tingkat kepatuhan syariah. Selain itu, hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis yang diajukan oleh teori agensi dan teori biaya politik. Hal ini dikarenakan, perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional. Perbedaan utama bank syariah dengan bank konvensional adalah pada aspek pondasi perbankan syariah yang mendasarkan praktik-praktiknya pada hukum syariah. Selanjutnya basis syariah ini mengarahkan perbankan syariah untuk memenuhi akuntabilitasnya kepada Allah SWT. Sehingga dalam keadaan apapun, besar atau kecilnya perbankan, mereka wajib memberikan pengungkapan secara penuh. Hal ini sejalan dengan konsep tauhid yang melandasi praktik perbankan syariah (Anuar *et al.*, 2009) (Rahman dan Bukair, 2013) (Grassa dan Matoussi, 2014). Di mana konsep tauhid merupakan dasar pertama dan prinsip tertinggi agama Islam, yang menyatakan bahwa hanya ada satu Tuhan yang wajib disembah secara hak, dan mewajibkan kepada seluruh hambanya untuk berserah secara mutlak. (Choudhury and Hussain, 2005) (Maali *et al.*, 2006).

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Kepatuhan syariah merupakan isu yang sangat mendasar dalam industri perbankan syariah. Hal ini dikarenakan, tingkat kepatuhan syariah yang dimiliki bank syariah menjadi tanda seberapa jauh bank syariah telah mematuhi prinsip atau aturan syariah. Salah satu media yang digunakan oleh bank syariah untuk menunjukkan tingkat kepatuhan syariah adalah *annual report* atau laporan tahunan.

Selanjutnya, bagi bank syariah itu sendiri, terdapat berbagai faktor yang dapat mendorong tingkat pengungkapan. Oleh karenanya peneliti telah menguji berbagai faktor yang memiliki kemungkinan dapat mendorong tingkat pengungkapan. Adapun, hasil dari penelitian ini:

1. Remunerasi DPS, berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan bahwa remunerasi DPS tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan syariah. Hal ini dikarenakan, bagi DPS yang merupakan perwakilan dari Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), melaksanakan pengawasan syariah merupakan tugas utama yang sangat penting, karena berkaitan dengan memastikan tegaknya hukum agama dalam institusi perbankan syariah. Sehingga, besarnya nominal DPS tidak menjadi pertimbangan bagi DPS dalam memberikan pengawasan syariah.
2. Keanggotaan-silang DPS, berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan bahwa keanggotaan-silang DPS berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan syariah. Hal ini dikarenakan, keanggotaan-silang dapat menambah pengetahuan dan pengalaman DPS

- dalam memberikan pengawasan terhadap aktivitas dan pelaporan bank syariah.
3. Komisaris independen, berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan bahwa besarnya proporsi komisaris independen dalam dewan komisaris dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan syariah. Hal ini dikarenakan, komisaris independen tidak terintimidasi oleh manajemen, sehingga dapat memberikan pengawasan yang baik kepada bank syariah.
  4. Komite audit independen, berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan bahwa besarnya proporsi komisaris independen dan pihak independen dalam komite audit berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan syariah. Hal ini dikarenakan, proporsi pihak independen dalam komite audit dapat membuat komite audit mempertahankan objektivitasnya dalam melakukan pengawasan. Selain itu, dengan keberadaan pihak independen ini dapat mempengaruhi pemilihan kebijakan akuntansi yang lebih baik.
  5. *Investment account holders* (IAH), berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan bahwa IAH tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan bank syariah. Hasil ini dikarenakan pemilik akun IAH tidak memiliki hak suara layaknya investor. Sehingga pemilik akun IAH tidak dapat mengontrol perilaku manajer dalam pengambilan kebijakan pengungkapan. Selain itu, terdapat pemilik akun IAH yang belum memiliki pengetahuan dasar tentang kontrak dan transaksi mereka didalam bank syariah.
  6. *Leverage*, berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan bahwa tingkat utang atau *leverage* tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan bank syariah. Hasil ini dikarenakan bank syariah dalam penelitian ini memiliki rasio *leverage* yang kecil. Sehingga, manajer akan lebih memilih melakukan pengungkapan terhadap *stakeholders* ketimbang mengungkapkan secara sukarela terhadap *bondholders*.
  7. Profitabilitas, berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan bahwa tingkat profitabilitas



bank syariah tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan syariah. Hasil ini dikarenakan bank syariah dalam penelitian ini memiliki tingkat profitabilitas yang cukup rendah. Sehingga, manajer cenderung menahan pengungkapan informasi lebih banyak, dengan tujuan menyembunyikan terjadinya kerugian dan penurunan keuntungan atau “*bad news*”. Selain itu, rendahnya profitabilitas, juga akan mengurangi tingkat kompensasi yang diterima manajer.

8. Ukuran perusahaan, berdasarkan penelitian ini, ditemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan syariah. Hasil ini menunjukkan bahwa, besar atau kecilnya perusahaan yang beroperasi dengan basis syariah wajib hukumnya untuk mengungkapkan kepatuhan syariah. Hal ini sebagai bentuk akuntabilitas kepada Allah SWT dan para nasabah yang telah mempercayakan dananya untuk dikelola secara syar’i.

## **5.2. Keterbatasan dan Saran**

Setelah melakukan pengumpulan data dan melakukan regresi. Peneliti menemukan beberapa keterbatasan seperti pertama, tidak terdapatnya *annual report* pada beberapa website resmi bank syariah; kedua, sedikitnya jumlah sampel yang memenuhi kriteria penelitian. Sehingga, peneliti tidak bisa melakukan regresi secara dinamis. Dimana, seandainya penelitian ini menggunakan analisis regresi dinamis, hasil dari penelitian ini akan lebih menggambarkan kondisi yang terjadi. Mengingat kejadian ekonomi yang terjadi pada saat ini akan berdampak pada pengambilan kebijakan di tahun yang akan datang.

Selanjutnya berdasarkan keterbatasan tersebut, peneliti menyarankan untuk melakukan penelitian dengan lingkup antar negara. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan

jumlah observasi yang lebih banyak dan memiliki karakteristik yang kompleks, sehingga diharapkan observasi yang lebih banyak dapat memberikan hasil yang lebih merepresentasikan kondisi bank syariah secara umum. Selain itu dengan menambahkan jumlah observasi antar negara ini, penelitian selanjutnya dapat menggali lebih banyak faktor-faktor dan membandingkan kinerja bank syariah dengan lebih baik. Adapun faktor-faktor yang dapat dikaji untuk penelitian selanjutnya adalah struktur kepemilikan saham bank syariah; pengaruh anggota komite audit yang ahli dalam bidang akuntansi, keuangan dan perbankan; keanggotaan DPS di AAOIFI; perbedaan kebudayaan antar negara; keahlian DPS dalam bidang akuntansi dan keuangan.

### **5.3. Implikasi Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, peneliti telah menemukan beberapa hal, yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait:

#### **1. Bagi Bank Syariah**

Berdasarkan penelitian ini, peneliti menemukan bahwa proporsi keberadaan komisaris independen, dan keberadaan pihak independen dalam komite audit berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan. Dengan hasil ini, peneliti berharap bank syariah tetap mempertahankan keberadaan komite audit di atas 50% dan proporsi pihak independen di atas 51%, hal ini diperlukan supaya aktivitas bank syariah dapat berjalan dengan baik. Karena, keberadaan komisaris independen, dan pihak independen dalam komite audit dapat memberikan arahan yang lebih maksimal. Selanjutnya, peneliti menemukan bahwa IAH atau dana nasabah tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan syariah. Hasil ini tentunya dapat mengingatkan para pemangku kepentingan di dalam

bank syariah. Dimana bank syariah, seharusnya lebih memberikan edukasi kontrak dan transaksi terhadap pemegang akun IAH. Mengingat proporsi IAH yang sangat besar didalam struktur modal bank syariah. Sehingga, apabila para pemegang akun IAH ini memiliki edukasi yang memadai, para pemegang akun IAH dapat lebih memperhatikan dan memberikan saran terhadap aktivitas bank syariah. Tujuan dari semua itu adalah kemajuan bank syariah di Indonesia dengan tetap memenuhi aturan-aturan syariah.

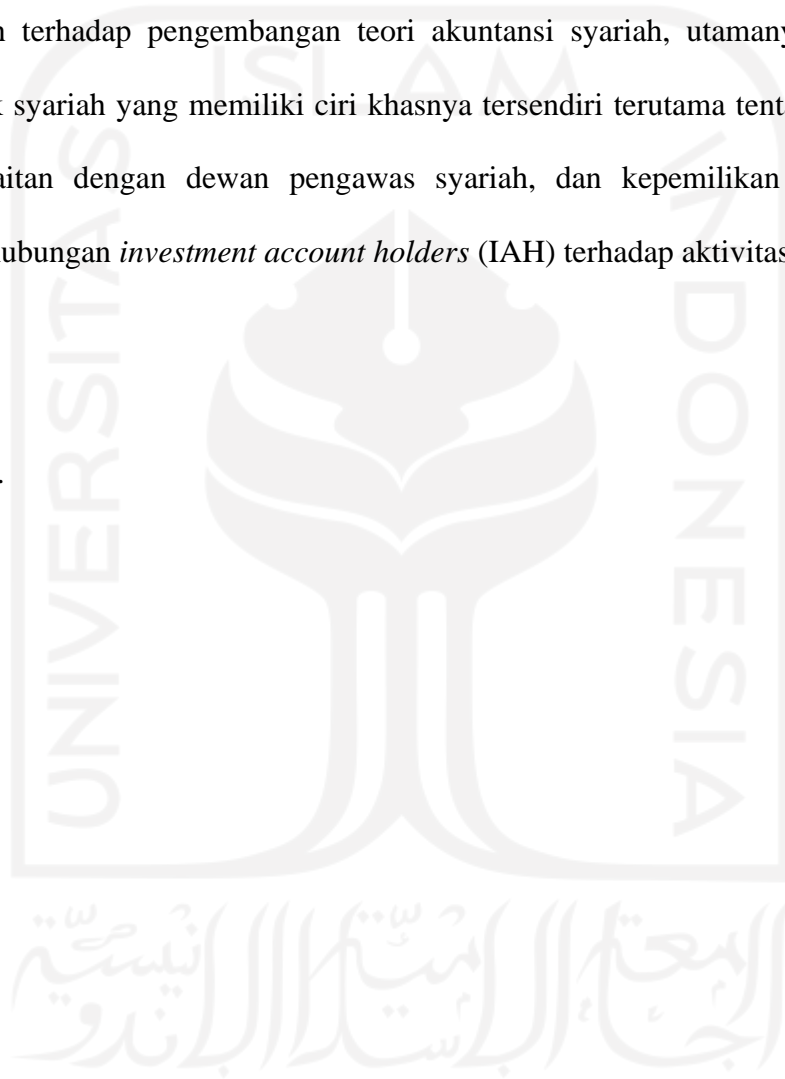
## **2. Bagi Regulator**

Berdasarkan hasil penelitian ini, kami menemukan bahwa remunerasi DPS tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan syariah. Hasil ini karena, remunerasi DPS antar bank syariah memiliki tingkat remunerasi yang berbeda-beda. Peneliti berharap, kepada regulator untuk memberikan batas bawah dan batas atas tentang nominal tetap yang akan diterima oleh DPS, dan tidak hanya diserahkan kepada bank syariah itu sendiri. Hal ini untuk menjaga motivasi antar DPS, yang nantinya mengarah pada kinerja pengawasan DPS. Selanjutnya, peneliti juga menyarankan, kepada regulator tentang keanggotaan-silang DPS. Dari penelitian ini ditemukan bahwa, keanggotaan-silang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan. Hasil ini tentu menunjukkan, DPS yang duduk pada beberapa bank syariah akan mendapatkan banyak pengalaman dan pengetahuan yang nantinya dapat mengarah pada kepatuhan syariah. Meskipun demikian, dalam penelitian ini, peneliti mengukur keanggotaan-silang DPS dengan proporsi anggota DPS yang menjadi DPS pada bank lain. Hasil yang kami terima cukup tinggi, bahwa banyak anggota DPS yang duduk pada bank syariah lain, dan bisa saja dapat membuat DPS tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan pengawasan atau pemberian nasihat terkait aktivitas bank syariah. Peneliti berharap, supaya regulator menentukan berapa maksimal DPS pada satu

bank yang menjadi DPS pada bank syariah lain. Hal ini, peneliti tujukan untuk membuat DPS dapat memberikan masukan dan pengawasan yang maksimal untuk bank syariah.

### 3. **Bagi Pengembangan Teori**

Berdasarkan penelitian ini peneliti berharap, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih terhadap pengembangan teori akuntansi syariah, utamanya tentang tata kelola bank syariah yang memiliki ciri khasnya tersendiri terutama tentang topik-topik yang berkaitan dengan dewan pengawas syariah, dan kepemilikan bank syariah, utamanya hubungan *investment account holders* (IAH) terhadap aktivitas bank syariah.



### Daftar Pustaka

- Abdullah, Wan Amalina Wan, Majella Percy, and Jenny Stewart. 2013. "Shari'ah Disclosures in Malaysian and Indonesian Islamic Banks: The Shari'ah Governance System." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 4 (2): 100–131. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2012-0063>.
- . 2015. "Determinants of Voluntary Corporate Governance Disclosure: Evidence from Islamic Banks in the Southeast Asian and the Gulf Cooperation Council Regions." *Journal of Contemporary Accounting and Economics* 11 (3): 262–79. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2015.10.001>.
- Aggarwal, Rajesh K., and Tarik Yousef. 2000. "Islamic Banks and Investment Financing." *Journal of Money, Credit and Banking* 32 (1): 93. <https://doi.org/10.2307/2601094>.
- Ahmad, Abu Umar Faruq, and M. Kabir Hassan. 2007. "Regulation and Performance of Islamic Banking in Bangladesh." *Thunderbird International Business Review* 49 (2): 251–77. <https://doi.org/10.1002/tie.20142>.
- Ahmed, Essia Ries, Tariq Tawfeeq, Yousif Alabdullah, Md. Aminul Islam and Muath Asmar. 2014. "Sukuk Legitimacy: A New Measurement Based on Content Analysis" *Conference Paper*.
- Al-Akra, Mahmoud, Ian A. Eddie, and Muhammad Jahangir. 2010. "The Influence of The Introduction of Accounting Disclosure Regulation on Mandatory Disclosure Compliance: Evidence from Jordan" *The British Accounting Review* 42 : 170–186. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2010.04.001>.
- Alfian, Barry, Lilik Handajani, and I Nyoman Nugraha Ardana Putra. 2020. "Dampak Dispersion Of Ownership, Financial Distress, Dewan Pengawas, Umur Listing Terhadap Pengungkapan Sukarela Bank Syariah." *E-Jurnal Akuntansi* 30 (6): 1603-1619. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i06.p20>.
- Alman, Mahir. 2012. "Shari'ah Supervisory Board Composition Effects on Islamic Banks' Risk-Taking Behavior." *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2140042>.
- Alrawahi, Fatema Ebrahim, and Adel Sarea. 2016. "An Investigation of the level of compliance with international Accounting Standards (IAS 1) by Listed Firms In Bahrain Bourse." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 9 (2). <https://doi.org/10.1108/mf.2008.00934jaa.001>.
- Al-Sadah, A.K.I. 2007. "Corporate Governance of Islamic Banks, Its Characteristics and Effect on Stakeholders and the role of Islamic banks Supervisors. Unpublished PhD Thesis, University of Surrey. U.K.
- Anuar, Hairul Azaln, Maliah Sulaiman, and Nik Nazli Nik Ahmad. 2009. "Some Evidence of Environmental Reporting By Shariah Compliant Companies." *IJUM Journal of Economics and Management* 17 (2): 177–208.

- Anwar, Suhardi M., Junaidi Junaidi, Salju Salju, Ready Wicaksono, and Mispianiti Mispianiti. 2020. "Islamic Bank Contribution to Indonesian Economic Growth." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 13 (3): 519–32. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-02-2018-0071>.
- Archer, Simon, Rifaat Ahmed Abdel Karim, and Volker Nienhaus. 2009. "Corporate Governance and Stakeholder Rights in Islamic Insurance." *Takaful Islamic Insurance: Concepts and Regulatory Issues*, 47–66. <https://doi.org/10.1002/9781118390528.ch4>.
- Aslam, Ejaz, Razali Haron, and Muhammad Naveed Tahir. 2019. "How Director Remuneration Impacts Firm Performance: An Empirical Analysis of Executive Director Remuneration in Pakistan." *Borsa Istanbul Review* 19 (2): 186–96. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2019.01.003>.
- Ayuningtyas, Ni Putu Winda, and I Ketut Sujana. 2018. "Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Leverage, Sales Growth, Dan Profitabilitas Pada Tax Avoidance." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 25 (3): 1884-1912. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i03.p10>.
- Azhar, Abdul Rahman, and Mohd Diah Hamdan. 2017. "The Extent of Compliance with FRS 101 Standard: Malaysian Evidence." *Journal of Applied Accounting Research* 18 (1): 87–115. <https://doi.org/10.1108/jaar-10-2013-0078>.
- Aziah, Abu Kasim Nor. 2012. "Disclosure of Shariah Compliance by Malaysian Takaful Companies." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 3 (1): 20–38. <https://doi.org/10.1108/17590811211216041>.
- Barako, Dulacha G. 2007. "Determinants of Voluntary Disclosures in Kenyan Companies Annual Reports." *African Journal of Business Management* 1 (5): 113–128.
- Chau, Gerald, and Patrick Leung. 2006. "The Impact of Board Composition and Family Ownership on Audit Committee Formation : Evidence from Hong Kong". *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation* 15: 1–15. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2006.01.001>.
- Chavent, Marie, Yuan Ding, Linghui Fu, Hervé Stolowy, and Huiwen Wang. 2006. "Disclosure and Determinants Studies: An Extension Using the Divisive Clustering Method (DIV)." *European Accounting Review* 15 (2): 181–218. <https://doi.org/10.1080/09638180500253092>.
- Chen, Charles J.P., and Bikki Jaggi. 2000. "Association between Independent Non-Executive Directors, Family Control and Financial Disclosures in Hong Kong." *Journal of Accounting and Public Policy* 19: 285–310. [https://doi.org/10.1016/S0278-4254\(00\)00015-6](https://doi.org/10.1016/S0278-4254(00)00015-6).
- Choudhury, Masudul Alam, and Md Mostaque Hussain. 2005. "A Paradigm of Islamic Money and Banking." *International Journal of Social Economics* 32 (3): 203–17. <https://doi.org/10.1108/03068290510580760>.

- Cotter, Julie, and Mark Silvester. 2003. "Board and Monitoring Committee Independence." *Abacus* 39 (2).
- Dahya, J, A A Lonie, and D M Power. 1996. "The Case for Separating the Roles of Chairman and CEO : An Analysis of Stock Market and Accounting Data." *Blackwell Publisher Ltd* 4 (2): 71–77. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1467-8683.1996.tb00136.x>.
- Damayanti, Alfina, Ro'fah Setyowati, and Islamiyati. 2016. "Efektivitas Pengawasan Dalam Implementasi Shariah Compliance Oleh Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Syariah." *Diponegoro Law Journal* 5 (3): 1–17. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12379>.
- Das, S., R. Dixon, and A. Michael. 2015. "Corporate Social Responsibility Reporting : A Longitudinal Study of Listed Banking Companies in Bangladesh." *World Review of Business Research*. 5 (1): 130–54.
- Debreceeny, Roger, and Asheq Rahman. 2005. "Firm-Specific Determinants of Continuous Corporate Disclosures." *The International Journal Of Accounting* 40: 249–278. <https://doi.org/10.1016/j.intacc.2005.06.002>.
- Eisenhardt, Kathleen M. 1989. "Agency Theory : An Assessment and Review." *Academy of Management Review* 14 (1): 57–74. <https://www.jstor.org/stable/258191>.
- El-Halaby, Sherif, and Khaled Hussainey. 2016. "Determinants of Compliance with AAOIFI Standards by Islamic Banks." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 9 (1). <http://dx.doi.org/10.1108/IMEFM-06-2015-0074>
- El-Halaby, Sherif, Khaled Hussainey, Mohamed Marie, and Hussien Mohsen. 2018. "The Determinants of Financial, Social and Sharia Disclosure Accountability for Islamic Banks." *Risk Governance and Control: Financial Markets & Institutions* 8 (3): 21–42. <https://doi.org/10.22495/rgcv8i3p2>.
- Elfeky, Mostafa I. 2017. "The Extent of Voluntary Disclosure and Its Determinants in Emerging Markets: Evidence from Egypt." *The Journal of Finance and Data Science* 3 : 45–59. <https://doi.org/10.1016/j.jfds.2017.09.005>.
- Fama, Eugene. 1980. "Agency Problems and the Theory of the Firm." *The Economic Nature of the Firm: A Reader, Third Edition* 88 (2): 270–82. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.022>.
- Fama, Eugene F, and Michael C Jensen. 1983. "Separation of Ownership and Control." *Journal of Law and Economics* 26 (2): 301–25.
- Farook, Sayd, M. Kabir Hassan, and Roman Lanis. 2011. "Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure: The Case of Islamic Banks." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 2 (2): 114–141. <https://doi.org/10.1108/17590811111170539>.
- Ferrero-Ferrero, Idoya, María Ángeles Fernández-Izquierdo, and María Jesús Muñoz-Torres. 2012. "The Impact of the Board of Directors Characteristics on Corporate Performance and Risk-Taking before and during the Global Financial Crisis." *Review of Managerial*

- Science* 6: 207. <https://doi.org/10.1007/s11846-012-0085-x>.
- Forker, John J. 1992. "Corporate Governance and Disclosure Quality." *Accounting and Business Research* 22 (86): 111–124. <https://doi.org/10.1080/00014788.1992.9729426>.
- Garas, Samy, and Suzanna ElMassah. 2018. "Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Disclosures: The Case of GCC Countries." *Critical Perspectives on International Business*. <https://doi.org/10.1108/cpoib-10-2016-0042>.
- Garas, Samy Nathan. 2012. "The Conflicts of Interest inside the Shari'a Supervisory Board." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 5 (2): 88–105. <https://doi.org/10.1108/17538391211233399>.
- Ghafran, Chaudhry, and Noel O'Sullivan. 2017. "The Impact of Audit Committee Expertise on Audit Quality: Evidence from UK Audit Fees." *British Accounting Review* 49: 578–593. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2017.09.008>.
- Glaum, Martin, Peter Schmidt, Donna L. Street, and Silvia Vogel. 2013. "Compliance with IFRS 3-and IAS 36-Required Disclosures across 17 European Countries: Company-and Country-Level Determinants." *Accounting and Business Research* 43 (3): 163–204. <https://doi.org/10.1080/00014788.2012.711131>.
- Grassa, Rihab. 2013. "Shariah Supervisory System in Islamic Financial Institutions: New Issues and Challenges: A Comparative Analysis between Southeast Asia Models and GCC Models." *Humanomics* 29 (4): 333–348. <https://doi.org/10.1108/H-01-2013-0001>.
- Grassa, Rihab, Raida Chakroun, and Khaled Hussainey. 2018. "Corporate Governance and Islamic Banks' Products and Services Disclosure." *Accounting Research Journal* 31 (1): 75–89. <https://doi.org/10.1108/ARJ-09-2016-0109>.
- Grassa, Rihab, and Hamadi Matoussi. 2014. "Corporate Governance of Islamic Banks: A Comparative Study between GCC and Southeast Asia Countries." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 7 (3): 346–362. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2013-0001>.
- Grossman, Sanford J, and Oliver D Hart. 1982. "Corporate Financial Structure and Managerial Incentives." *The Economics of Information and Uncertainty* 107–40.
- Haniffa, R. M., and T. E. Cooke. 2002. "Culture, Corporate Governance and Disclosure in Malaysian Corporations." *Abacus* 38 (3): 317–349. <https://doi.org/10.1111/1467-6281.00112>.
- Haniffa, Roszaini, and Mohammad Hudaib. 2007. "Exploring the Ethical Identity of Islamic Banks via Communication in Annual Reports." *Journal of Business Ethics* 76: 97–116. <https://doi.org/10.1007/s10551-006-9272-5>.
- Inchausti, Begoña Giner. 1997. "The Influence of Company Characteristics and Accounting Regulation on Information Disclosed by Spanish Firms." *European Accounting Review* 6 (1): 45–68. <https://doi.org/10.1080/096381897336863>.



- Jensen, Michael, and William Meckling. 1976. "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure." *Journal of Financial Economics* 3 (4): 305–360. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>.
- Jo, Hoje, and Maretno A. Harjoto. 2011. "Corporate Governance and Firm Value: The Impact of Corporate Social Responsibility." *Journal of Business Ethics* 103: 351–383. <https://doi.org/10.1007/s10551-011-0869-y>.
- Juairiah, and Rosyidah Umpu Malwa. 2016. "Hubungan Antara Pemberian Remunerasi Terhadap Kinerja Karyawan Di Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang." *Psikis: Jurnal Psikologi Islami* 2 (2): 161-171.
- Juhmani, Omar. 2017. "Corporate Governance and the Level of Bahraini Corporate Compliance with IFRS Disclosure." *Journal of Applied Accounting Research* 18 (1): 22–41. <https://doi.org/10.1108/JAAR-05-2015-0045>.
- Karim, Md. Rezaul, and Samia Afrin SHETU. 2020. "Level of Shariah Compliance in the Operation of Islamic Banks in Bangladesh: An Empirical Study." *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 3: 293–317. <https://doi.org/10.25272/ijisef.755679>.
- Khan, Arifur, Mohammad Badrul Muttakin, and Javed Siddiqui. 2013. "Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Disclosures: Evidence from an Emerging Economy." *Journal of Business Ethics* 114: 207–23. <https://doi.org/10.1007/s10551-012-1336-0>.
- Klein, April. 2002. "Economic Determinants of Audit Committee Independence." *The Accounting Review* 77 (2): 435–452.
- Maali, Bassam, Peter Casson, and Christopher Napier. 2006. "Social Reporting by Islamic Banks." *Abacus* 42 (2): 266–289. <https://doi.org/10.1111/j.1468-4497.2006.00200.x>.
- Malik, Muhammad Shaukat, Ali Malik, and Waqas Mustafa. 2011. "Controversies That Make Islamic Banking Controversial: An Analysis of Issues and Challenges." *American Journal of Social and Management Sciences*, 2(1): 41–46. <https://doi.org/10.5251/ajsms.2011.2.1.41.46>.
- Marston, Claire, and Annika Polei. 2004. "Corporate Reporting on the Internet by German Companies." *International Journal of Accounting Information Systems* 5: 285–311. <https://doi.org/10.1016/j.accinf.2004.02.009>.
- Meilinda, Hera, Apri Budianto, and Mukhtar Abdul Kader. 2019. "Pengaruh Remunerasi dan Budaya Kerja Terhadap Kinerja Pegawai (Suatu Studi Pada Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy Banjar)." *Bussiness Manajemen and Enterpreneurship Journal* 1 (3): 141–54.
- Mnif, Yosra, and Marwa Tahari. 2020a. "Corporate Governance and Compliance with AAOIFI Governance Standards by Islamic Banks." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-03-2019->

0123.

- . 2020b. “The Effect of Islamic Banks’ Specific Corporate Governance Mechanisms on Compliance with AAOIFI Governance Standards.” *Journal of Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2018-0188>.
- Mnif, Yosra, and Oumaima Znazen. 2020. “Corporate Governance and Compliance with IFRS 7: The Case of Financial Institutions Listed in Canada.” *Managerial Auditing Journal* 35 (3): 448–474. <https://doi.org/10.1108/MAJ-08-2018-1969>.
- Mokoginta, Rena Mustari, Herman Karamoy, and Linda Lambey. 2018. “Pengaruh Komisaris Independen, Dewan Pengawas Syariah, Kepemilikan Institusional, Dan Profitabilitas Terhadap Tingkat Pengungkapan Tanggung-Jawab Sosial Pada Bank Syariah Di Indonesia.” 55–71. <https://doi.org/10.35800/jjs.v9i1.19103>.
- Nomran, Naji Mansour, Razali Haron, and Rusni Hassan. 2018. “Shari’ah Supervisory Board Characteristics Effects on Islamic Banks’ Performance: Evidence from Malaysia.” *International Journal of Bank Marketing* 36 (2): 290–304. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3598723>.
- Nurhayati, Elis, and Endang Supardi. 2020. “Sistem Remunerasi dan Kualitas Kinerja Pegawai.” *Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran* 5 (2): 140–153. <https://doi.org/10.17509/jpm.v4i2.18008>.
- Omar, Bilal, and Jon Simon. 2011. “Corporate Aggregate Disclosure Practices in Jordan.” *Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting* 27: 166–86. <https://doi.org/10.1016/j.adiac.2011.05.002>.
- Panjaitan, Santi Rohdearni, and Eva Sriwiyanti. 2020. “Analisis Pengaruh Lintas Keanggotaan Dewan Pengawas Dan Keahlian Anggota Dewan Pengawas Terhadap Pengungkapan Laporan Dewan Pengawas Pada Bank Syariah Di Indonesia 2017 – 2019.” *Journal of Accounting* 2 (1): 28–38. <https://doi.org/10.36985/accusi.v2i1.50>.
- Pearce, John A., and Shaker A. Zahra. 1992. “Board Composition From a Strategic Contingency Perspective.” *Journal of Management Studies* 29 (4): 411–438. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.1992.tb00672.x>.
- Prabowo, Bagya Agung, and Jasri Bin Jamal. 2017. “Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24 (1): 113–129. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art6>.
- Prasanti, Tyas Ayu, Triastuti Wuryandari, and Agus Rusgiyono. 2015. “Aplikasi Regresi Data Panel Untuk Pemodelan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah.” *Jurnal Gaussian* 4 (3): 687–696.
- Rahman, Azhar Abdul, and Abdullah Awadh Bukair. 2013. “The Influence of The Shariah Supervision Board on Corporate Social Responsibility Disclosure by Islamic Banks of Gulf C0-Operation Council Countries.” *Asian Journal of Business and Accounting* 6

(2).

- . 2015. “The Effect of the Board of Directors’ Characteristics on Corporate Social Responsibility Disclosure by Islamic Banks.” *Journal of Management Research* 7 (2). <https://doi.org/10.5296/jmr.v7i2.6989>.
- Rashid, Mamun, M Kabir Hassan, Abu Umar Faruq Ahmad. 2014. “Quality Perception of the Customers towards Domestic Islamic Banks in Bangladesh.” *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance* 5 (1): 109–131.
- Razali, Mohd Waliuddin Mohd, Ng Sue Yee, Josephine Yau Tan Hwang, Akmal Hisham Bin Tak, and Norlina Kadri. 2018. “Directors’ Remuneration and Firm’s Performance: A Study on Malaysian Listed Firm under Consumer Product Industry.” *International Business Research* 11 (5): 102-109. <https://doi.org/10.5539/ibr.v11n5p102>.
- Ruslim, Herman, and Ineke Santoso. 2018. “Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Jumlah Direktur, Jumlah Komite Audit, Kepemilikan Saham Institusional, Kepemilikan Saham Manajemen Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan.” *Jurnal Ekonomi* 23 (3): 334–346. <https://doi.org/10.24912/je.v23i3.417>.
- Saqib, Lutfullah, Muhammad Aitizam Farooq, and Aliya Mueen Zafar. 2016. “Customer Perception Regarding Shari’ah Compliance of Islamic Banking Sector of Pakistan.” *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 7 (4): 282–303. <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2013-0031>.
- Sarea, Adel Mohammed, and Mustafa Mohd Hanefah. 2013. “Adoption of AAOIFI Accounting Standards by Islamic Banks of Bahrain.” *Journal of Financial Reporting and Accounting* 11 (2): 131–142. <https://doi.org/10.1108/jfra-07-2012-0031>.
- Sellami, Yosra Mnif, and Hela Borgi Fendri. 2017. “Article Information : The Effect of Audit Committee Characteristics on Compliance with IFRS for Related Party Disclosures : Evidence from South Africa.” *Managerial Auditing Journal* 32 (6). <https://doi.org/10.1108/MAJ-06-2016-1395>.
- Sellami, Yosra Mnif, and Marwa Tahari. 2017. “Factors Influencing Compliance Level with AAOIFI Financial Accounting Standards by Islamic Banks.” *Journal of Applied Accounting Research* 18 (1): 137–159. <https://doi.org/10.1108/JAAR-01-2015-0005>.
- Sencal, Harun, and Mehmet Asutay. 2020. “Ethical Disclosure in the Shari’ah Annual Reports of Islamic Banks: Discourse on Shari’ah Governance, Quantitative Empirics and Qualitative Analysis.” *Corporate Governance* 21 (1): 175–211. <https://doi.org/10.1108/CG-01-2020-0037>.
- Srairi, Samir. 2018. “Determinants of Corporate Risk Disclosure Practice: The Case of Islamic Banks in Gulf Cooperation Council Region.” *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research* 15 (1): 16–38. <https://doi.org/10.33102/jmifr.v15i1.99>.
- Tsalavoutas, Ioannis. 2011. “Transition to IFRS and Compliance with Mandatory Disclosure Requirements: What Is the Signal?” *Advances Accounting* 27 (2): 390–405.

<https://doi.org/>: <http://dx.doi.org/> 10.1016/j.adiac.2011.08.006.

- Ullah, Hafij. 2014. "Shari'ah Compliance in Islamic Banking: An Empirical Study on Selected Islamic Banks in Bangladesh." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 7 (2): 182–199. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-06-2012-0051>.
- Watts, Ross L., and Jerold L. Zimmerman. 1990. "Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective." *The Accounting Review* 65 (1): 131–156.
- Watts, Ross L., and Jerold Zimmerman. 1978. "Towards a Positive Theory Of The Determination of Accounting Standards" *The Accounting Review* 53 (1).
- Weisbach, Michael S. 1988. "Outside Directors and CEO Turnover" *Journal of Financial Economics* 20: 431–460. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(88\)90053-0](https://doi.org/10.1016/0304-405X(88)90053-0).
- Widarjono, Agus, Mustika Noor Mifrahi, and Andika Ridha Ayu Perdana. 2020. "Determinants of Indonesian Islamic Rural Banks' Profitability: Collusive or Non-Collusive Behavior?" *Journal of Asian Finance, Economics and Business* 7 (11): 657–668. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no11.657>.
- Yani, Ni Putu Tista Paradiva, and I Dewa Gede Dharma Suputra. 2020. "Pengaruh Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional Dan Leverage Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility." *E-Jurnal Akuntansi* 30 (5): 1196-1207. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i05.p10>.
- Yaya, Rizal. 2004. "Would the Objectives and Characteristics of Islamic Accounting for Islamic Business Organisation Meets the Islamic Socio-Economic Objectives?" *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* 8 (2): 141–163.
- Yusof, Eddy, and Ezry Fahmy. 2008. "Are Islamic Banks in Malaysia Really 'Islamic'?" *Munich Personal RePEc Archive (MPRA)* 20901: 1–12.
- Zainuddin, Mohd Haniff, Tze Kiat Lui, and Kwang Jing Yii. 2018. "Principal-Agent Relationship Issues in Islamic Banks: A View of Islamic Ethical System." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 11 (2): 297–311. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-08-2017-0212>.

## Lampiran

**Lampiran 1. Rangkuman Data**

NO	BANK	TAHUN	Y	SSBREM	SSBCROSS	Komind	Audind	IAH	SIZE	leverage	PROFIT
1	BSM	2015	81.67	9.00	33.33	60.00	85.71	9.69	13.85	14.04	0.41
		2016	88.33	8.98	33.33	60.00	50.00	9.52	13.90	14.25	0.41
		2017	83.33	9.21	66.67	75.00	85.71	9.12	13.94	15.39	0.42
		2018	85.00	9.30	66.67	80.00	71.43	9.39	13.99	14.72	0.62
		2019	85.00	9.39	60.00	100.00	100.00	9.04	14.05	16.97	1.14
		2020	85.00	9.35	66.67	80.00	80.00	7.78	14.10	24.71	1.14
2	BRIS	2015	78.33	8.89	50.00	60.00	85.71	6.61	13.38	26.50	0.51
		2016	85.00	9.05	50.00	60.00	80.00	6.66	13.44	30.57	0.61
		2017	85.00	9.14	50.00	75.00	100.00	7.62	13.50	28.85	0.32
		2018	85.00	9.14	100.00	75.00	100.00	4.38	13.58	31.37	0.28
		2019	86.67	9.18	100.00	50.00	100.00	5.14	13.62	28.20	0.18
		2020	86.67	9.17	100.00	50.00	100.00	6.39	13.76	30.28	0.43
3	BNIS	2015	83.33	8.76	100.00	75.00	100.00	7.89	13.36	14.38	0.99
		2016	83.33	8.81	100.00	100.00	100.00	8.50	13.45	16.55	0.98
		2017	83.33	8.95	100.00	100.00	100.00	6.41	13.54	18.99	0.88
		2018	81.67	8.91	100.00	80.00	100.00	6.37	13.61	23.84	1.01
		2019	81.67	9.10	100.00	80.00	83.33	6.79	13.70	26.15	1.21
		2020	85.00	9.05	100.00	75.00	83.33	5.92	13.74	31.36	0.92
4	BMI	2015	83.33	9.03	66.67	50.00	75.00	12.70	13.76	15.67	0.13
		2016	83.33	8.95	66.67	50.00	75.00	11.80	13.75	16.99	0.14
		2017	83.33	8.98	100.00	60.00	100.00	8.33	13.79	16.18	0.04
		2018	83.33	9.02	100.00	60.00	100.00	11.18	13.76	16.52	0.08

		2019	85.00	8.93	100.00	60.00	100.00	9.40	13.70	19.03	0.03
		2020	85.00	8.84	50.00	60.00	100.00	9.52	13.71	18.58	0.02
5	BCAS	2015	78.33	8.82	50.00	66.67	100.00	2.76	12.64	9.05	0.54
		2016	78.33	8.98	50.00	66.67	100.00	3.16	12.70	8.40	0.74
		2017	83.33	9.01	50.00	66.67	100.00	3.59	12.78	12.52	0.80
		2018	85.00	9.02	100.00	66.67	100.00	3.99	12.85	10.95	0.83
		2019	86.67	9.06	100.00	66.67	75.00	2.76	12.64	9.05	0.54
		2020	85.00	9.08	100.00	75.00	100.00	3.16	12.70	8.40	0.74
		2015	76.67	8.70	50.00	66.67	66.67	4.48	12.85	11.79	0.75
6	Panin Syariah	2016	73.33	8.69	50.00	0.00	50.00	5.91	12.94	11.64	0.22
		2017	71.67	8.69	50.00	100.00	66.67	28.09	12.94	7.58	-11.23
		2018	73.33	8.81	50.00	66.67	66.67	3.74	12.94	9.74	0.24
		2019	80.00	8.77	50.00	66.67	66.67	5.23	13.05	5.24	0.15
		2020	80.00	8.81	50.00	66.67	33.33	2.43	13.05	5.32	0.00
		2015	73.33	8.79	33.33	100.00	100.00	0.67	12.75	16.81	0.22
7	Mega Syariah	2016	85.00	8.80	66.67	100.00	100.00	0.72	12.79	10.66	1.80
		2017	83.33	8.86	50.00	100.00	100.00	0.64	12.85	18.51	1.03
		2018	81.67	8.89	50.00	100.00	100.00	4.32	12.87	12.77	0.63
		2019	83.33	8.72	0.00	100.00	100.00	4.43	12.90	12.52	0.61
		2020	85.00	8.79	0.00	100.00	100.00	3.71	12.90	82.46	1.65
		2015	75.00	8.43	50.00	75.00	33.33	6.82	12.77	15.04	0.48
8	Bukopin Syariah	2016	76.67	8.46	50.00	50.00	33.33	7.22	12.84	19.05	-1.25
		2017	76.67	8.45	100.00	50.00	33.33	5.40	12.86	17.82	0.02
		2018	78.33	8.39	100.00	50.00	50.00	4.71	12.80	21.76	0.04
		2019	76.67	7.80	100.00	66.67	66.67	5.04	12.83	20.44	0.04
		2020	80.00	8.48	100.00	66.67	66.67	2.07	12.79	39.95	0.00
		2015	70.00	8.64	0.00	66.67	80.00	2.62	12.72	18.77	3.63
9	BTPN Syariah	2016	73.33	8.73	0.00	66.67	80.00	2.76	12.86	18.24	5.63

		2017	71.67	8.70	50.00	50.00	100.00	2.33	12.96	22.38	7.32
		2018	76.67	8.76	100.00	50.00	100.00	1.50	13.08	20.26	8.02
		2019	76.67	8.83	100.00	50.00	100.00	1.40	13.21	14.89	8.54
		2020	76.67	8.89	100.00	50.00	100.00	1.35	13.22	16.02	5.20
10	BJB Syariah	2015	81.67	8.77	0.00	50.00	75.00	4.67	12.81	8.15	0.11
		2016	83.33	8.75	0.00	50.00	75.00	0.76	12.87	12.64	-5.57
		2017	85.00	8.75	0.00	75.00	75.00	0.78	12.89	10.77	-4.97
		2018	86.67	8.69	0.00	75.00	75.00	5.72	12.83	15.12	0.25
		2019	85.00	8.70	33.33	66.67	80.00	6.42	12.89	16.60	0.22
		2020	86.67	8.91	50.00	66.67	80.00	5.18	12.95	16.04	0.05



## Lampiran 2. Item Pengungkapan Kepatuhan

No	Dimensi	Indeks Pengungkapan	Skor
1	Indeks Pengungkapan Informasi Berkaitan Dewan Pengawas Syariah	Nama anggota DPS	1
2		Latar belakang dan kualifikasi DPS	1
3		Jumlah anggota DPS	1
4		Gambar anggota DPS	1
5		Peran dan tanggung jawab DPS	1
6		Otoritas / wewenang DPS	1
7		Departemen audit syariah	1
8		Jumlah rapat dewan	1
9		Apakah situs web atau laporan tahunan mengungkapkan fatwa dewan syariah terkait layanan syariah?	1
10		Laporan DPS ditugaskan atau ditetapkan oleh Dewan Komisaris	1
11		Informasi tentang tanggungjawab bank atas Zakat	1
12		Informasi tentang dana non halal dan cara menghadapinya	1
13		Informasi tentang proses distribusi keuntungan di bank sesuai dengan syariah Islam	1
14		Informasi tentang independensi DPS dengan Piagam	1
15		Informasi tentang kepatuhan bank terhadap peraturan-peraturan Syariah	1
16		Dewan mengungkapkan pendapatnya setelah mereview semua dokumen dan semua laporan keuangan Bank	1
17		Apakah informasi atau laporan tersebut menunjukkan bahwa bank telah memenuhi standar yang berlaku	1
18		Informasi tentang tanggal laporan dan nama bank	1
19		Laporan DPS	1
20	Indeks Informasi Berkaitan dengan Penyajian dan Pengungkapan pada Laporan Keuangan	Laporan keuangan komparatif	1
21		Informasi umum tentang bank	1
22		Pengungkapan mata uang yang digunakan dalam pengukuran akuntansi	1
23		Pengungkapan kebijakan akuntansi yang signifikan	1
24		Pengungkapan pendapatan atau pengeluaran yang dilarang syariah	1
25		Pengungkapan tentang risiko aset dan kewajiban	1
26		Pengungkapan kontinjensi	1



27		Pengungkapan perubahan kebijakan akuntansi	1
28		Penyajian dan pengungkapan posisi keuangan	1
29		Penyajian dan pengungkapan dalam laporan laba rugi	1
30		Pengungkapan dalam laporan arus kas	1
31		Pernyataan perubahan ekuitas pemilik	1
32		Laporan perubahan investasi terikat	1
33		Pengungkapan dalam pernyataan sumber dan penggunaan dana zakat dan sedekah	1
34		Pengungkapan dalam pernyataan sumber dan penggunaan dana qordul hassan	1
35	Informasi Berkaitan dengan <i>Corporate Social Responsibility</i>	<b>Kesejahteraan karyawan</b>	
		a. Kebijakan tentang upah dan remunerasi	1
		b. Kebijakan pendidikan dan pelatihan karyawan	1
		c. Kebijakan kesempatan yang sama/ kesetaraan	1
		d. Kebijakan tentang lingkungan kerja	1
36		<b>Lingkungan</b>	
		a. Jumlah sumbangan atau kegiatan yang dilakukakn untuk melindungi lingkungan	1
		b. Proyek-proyek yang dibiayai oleh bank yang dapat merusak lingkungan	1
		c. Kebijakan pelestarian lingkungan	1
37		<b>Pendapatan Non-Halal</b>	
		a. Jumlah pendapatan atau pengeluaran dari transaksi tersebut	1
		b. Bagaimana bank melepaskan dana tersebut	1
38		<b>Pembayaran terlambat dan klien bangkrut</b>	
		a. Kebijakan dalam menangani klien bangkrut	1
		b. Jumlah denda yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran	1
		c. Pendapat Dewan Syariah terhadap denda keterlambatan	1
39		<b>Qard Hassan</b>	
		a. Sumber dana yang dialokasikan untuk Qard Hasan	1
		b. Jumlah yang diberikan kepada penerima manfaat	1
		c. Tujuan sosial pemberian dana tersebut	1

	d .	Kebijakan bank dalam menangani penerima manfaat yang pailit	1
40	Zakat		
	a.	Pengungkapan sumber dan penyalurannya	1
	b .	Saldo dana zakat	1
	c.	Pengesahan Dewan Syariah tentang penghitungan dan distribusi dana zakat	1
	d .	Pendapat Dewan Syariah terhadap validitas perhitungan	1
41	Aktifitas amal		
	a.	Kegiatan sosial yang dibiayai	1
	b .	Jumlah dana yang dihabiskan	1
	c.	Sumber dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan tersebut	1
42	Pengelolaan Wakaf		1
43	Keterlibatan kepada masyarakat		
	a.	Peran bank syariah terhadap pembangunan ekonomi	1
	b .	Peran bank dalam mengatasi masalah sosial	1
Total Item Pengungkapan			60
Persentase Pengungkapan			100

### Lampiran 3. Hasil *Common Effects*

Dependent Variable: Y  
Method: Panel Least Squares  
Date: 03/02/22 Time: 21:55  
Sample: 2015 2020  
Periods included: 6  
Cross-sections included: 10  
Total panel (balanced) observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
SSBREM	5.736235	2.727920	2.102787	0.0404
SSBCROSS	0.010983	0.014889	0.737654	0.4641
KOMIND	0.018675	0.028252	0.661032	0.5116
AUDIND	0.021459	0.030789	0.696957	0.4890

IAH	-0.475113	0.164433	-2.889397	0.0057
SIZE	4.151466	1.785612	2.324954	0.0241
LEVERAGE	0.044489	0.044654	0.996314	0.3238
PROFIT	-0.802398	0.229447	-3.497102	0.0010
C	-25.63345	19.05736	-1.345068	0.1846

---

R-squared	0.490073	Mean dependent var	81.27767
Adjusted R-squared	0.410085	S.D. dependent var	4.596259
S.E. of regression	3.530199	Akaike info criterion	5.498067
Sum squared resid	635.5776	Schwarz criterion	5.812218
Log likelihood	-155.9420	Hannan-Quinn criter.	5.620949
F-statistic	6.126801	Durbin-Watson stat	1.177087
Prob(F-statistic)	0.000016		

---

#### Lampiran 4 *Fixed Effects*

Dependent Variable: Y  
Method: Panel Least Squares  
Date: 03/02/22 Time: 21:56  
Sample: 2015 2020  
Periods included: 6  
Cross-sections included: 10  
Total panel (balanced) observations: 60

---

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
SSBREM	-2.466495	3.195201	-0.771937	0.4445
SSBCROSS	0.041688	0.017447	2.389388	0.0214
KOMIND	0.056841	0.028104	2.022502	0.0495
AUDIND	-0.079559	0.035413	-2.246602	0.0300
IAH	-0.122117	0.128201	-0.952550	0.3463
SIZE	8.590950	4.265429	2.014088	0.0504
LEVERAGE	0.060275	0.036062	1.671415	0.1021
PROFIT	0.273338	0.235714	1.159617	0.2528
C	-10.79858	50.78383	-0.212638	0.8326

---

Effects Specification

---

Cross-section fixed (dummy variables)

---

R-squared	0.818280	Mean dependent var	81.27767
Adjusted R-squared	0.744727	S.D. dependent var	4.596259
S.E. of regression	2.322239	Akaike info criterion	4.766266
Sum squared resid	226.4973	Schwarz criterion	5.394569
Log likelihood	-124.9880	Hannan-Quinn criter.	5.012030
F-statistic	11.12501	Durbin-Watson stat	2.004138
Prob(F-statistic)	0.000000		

---

**Lampiran 5** Uji Chow  
 Redundant Fixed Effects Tests  
 Equation: Untitled  
 Test cross-section fixed effects

---

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	8.428538	(9,42)	0.0000
Cross-section Chi-square	61.908062	9	0.0000

---

## Lampiran 6. Random Effects

Dependent Variable: Y  
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)  
 Date: 03/02/22 Time: 21:56  
 Sample: 2015 2020  
 Periods included: 6  
 Cross-sections included: 10  
 Total panel (balanced) observations: 60  
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
SSBREM	2.309290	2.625238	0.879650	0.3832
SSBCROSS	0.029251	0.014154	2.066607	0.0439
KOMIND	0.041819	0.025902	1.614477	0.1126
AUDIND	-0.035545	0.029160	-1.218952	0.2285
IAH	-0.204728	0.123071	-1.663492	0.1023
SIZE	4.808817	2.272240	2.116334	0.0392
LEVERAGE	0.051575	0.033938	1.519710	0.1348
PROFIT	0.014855	0.215094	0.069063	0.9452
C	-4.199399	26.20956	-0.160224	0.8733

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		2.620825	0.5602
Idiosyncratic random		2.322239	0.4398

Weighted Statistics			
R-squared	0.320835	Mean dependent var	27.64784
Adjusted R-squared	0.214299	S.D. dependent var	2.874390
S.E. of regression	2.547853	Sum squared resid	331.0692
F-statistic	3.011525	Durbin-Watson stat	1.438864
Prob(F-statistic)	0.007594		

**Lampiran 7. Uji Hausman**

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

---

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	18.391040	8	0.0185

---

